

SIAP TERAPKAN INDUSTRI 4.0

Edisi
01-2018



16 **KEBIJAKAN**

Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 1
Tahun 2018

20 **EKONOMI & BISNIS**

Bandung Techno Park

48 **VOKASI**

Program Vokasi Industri
Makin Diminati



Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar.
Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman.
Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Bung Hatta



PENGANTAR REDAKSI

MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN

Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur sudah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor ini mencapai 20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Manufaktur mampu menjaga pertumbuhan yang tinggi. Pada kuartal terakhir 2017, mengutip data BPS, sektor ini mencatat pertumbuhan 5,14 persen, jauh melampaui pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya 3,91 persen. Sepanjang tahun lalu, manufaktur tumbuh 4,74 persen.

Kontribusi manufaktur terhadap perekonomian tercermin dari beberapa indikator, seperti investasi, penyerapan tenaga kerja, devisa ekspor, pajak, hingga dampaknya yang luas ke sektor-sektor lain.

PENGAKUAN DUNIA

Meskipun masih banyak yang perlu dibenahi, upaya pemerintah mulai membuahkan hasil. Setidaknya, ini bisa dilihat dari sejumlah laporan lembaga internasional independen terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Dalam laporan Asia Business Outlook Survey 2018 yang dirilis oleh the Economist, misalnya, Indonesia dinilai sebagai negara tujuan utama ketiga di Asia yang menarik bagi investor.

Pengakuan juga diberikan oleh UNCTAD dalam World Investment Report 2017. Dalam laporan itu, Indonesia berada pada peringkat keempat di dunia terkait MNEs' top prospective host economies untuk periode 2017-2019.

Lembaga rating internasional seperti S&P sebelumnya telah menaikkan peringkat Indonesia ke investment grade. Demikian pula lembaga lainnya, seperti Fitch, Moody's, dan R&I, yang mengubah outlook Indonesia dari stable ke positive.

Secara umum, kinerja manufaktur Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Survei US News bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi terbaik kedua di dunia, mengalahkan negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia dan Singapura.

Dilihat dari pertumbuhan investasi tahun 2016, sektor manufaktur Indonesia mencatat

pertumbuhan paling tinggi di tingkat ASEAN yakni 41,8 persen, disusul Malaysia 25,0 persen, dan Vietnam 3,1 persen. Sebaliknya, Singapura dan Thailand justru menurun, masing-masing 29,6 persen dan 27,5 persen.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah terus membenahi berbagai regulasi, termasuk menyederhanakan peraturan mengenai insentif perpajakan.

Insentif itu antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, penurunan pajak bagi industri kecil dan menengah (IKM), insentif menarik bagi perusahaan yang melakukan kegiatan research and development (R&D) dan program pendidikan vokasi industri.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan terobosan besar dalam hal penyederhanaan perizinan dengan mempercepat implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017.

Dengan berbagai kebijakan yang ramah investasi, pemerintah berharap ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,4 persen pada tahun 2018. Adapun sektor industri, yang menjadi andalan perekonomian, ditargetkan tumbuh lebih tinggi lagi yakni 5,67 persen. **mi**



Pengarah: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. **Pemimpin Umum:** Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar N. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Humas Setia Utama. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Siti Maryam. **Redaktur Pelaksana:** Habibi Yusuf Sarjono. **Editor:** Junaidi, Feby Setyo Hariyono. **Fotografer:** Titin Fauziyah Rochmawati. **Anggota Redaksi:** Manangi Manalu, Krisna Sulistiyani, Yurima Febiany, Arief Febriant Putra.

Alamat Redaksi:
Biro Hubungan Masyarakat
Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta

Telp : (021) 5255509 ext. 2648
Fax : (021) 5255609

Akun Media Sosial:
Twitter : @Kemenperin_RI
Facebook : Kementerian Perindustrian RI
Instagram : @kemenperin_ri
Youtube : Kementerian Perindustrian RI

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan panjang naskah 3.000-6.000 karakter, disertai identitas penulis.

Naskah dikirim ke email:
humas@kemenperin.go.id

Majalah ini dapat diakses melalui
www.kemenperin.go.id/majalah



6 LAPORAN UTAMA

Making Indonesia 4.0
Manufaktur Tetap Jadi Andalan

16 KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 4 Tahun 2018

18 EKONOMI & BISNIS

Kerja Sama
Kemenperin-Ruangguru

Bandung Techno Park

Bersinergi Membangun
Industri Kereta Api

Farmasi Bergairah,
Sektor IKTA Kian Cera

Prospek Smelter Cera,
Nvestasi Meriah

Memahami Kembali Esensi
SNI Wajib



Fintech di Pondok Pesantren

Impor Garam Industri Topang
Manufaktur

Memacu Pembangunan
Kawasan Industri

41 INFOGRAFIS

Pertumbuhan Industri Pengolahan
Nonmigas Tahun 2017



42 KERJA SAMA

Menjaring Investasi Inggris
di Sektor Industri

Kolaborasi ASEAN Hadapi
Industry 4.0

UNI Emirat Arab Incar Proyek
Listrik dan Alat Kesehatan

48 VOKASI

Program Vokasi Industri
Makin Diminati

51 KAMUS INDUSTRI

Manufacturing Value Added

52 SERBA-SERBI

Konsistensi Menjaga Keterbukaan
Informasi Publik

54 DESTINASI

Labuan Bajo



60 LENS PERISTIWA

62 INOVASI

Belajar Dari Teknologi Kendaraan
Listrik Mitsubishi

64 INSERT

Baristand Industri Palembang

66 SOSOK

Rozalis A. Sandang: Saatnya Pasar
Elektronik Keluar dari Lembah

Saya mahasiswi semester 6 Desain Produk FSRD ITB. Apakah Kemenperin sekarang sedang membuka internship untuk mahasiswa yang ingin belajar di bawah Ditjen Industri Kecil dan Menengah? Saya sangat tertarik untuk belajar dari Kemenperin yang mungkin tidak akan saya dapatkan di perkuliahan. Terima Kasih.

Yolanda Anggita (Bandung)

Jawaban:

Kementerian Perindustrian membuka kesempatan untuk magang/Praktek Kerja Lapangan kepada pelajar dan/atau mahasiswa, dengan persyaratan administrasi persuratan pengantar dari kampus/universitas. Perlu kami sampaikan bahwa selama magang, Kementerian Perindustrian tidak memberikan jasa dan materi atau fasilitas khusus lainnya terkait pelaksanaan magang.

Memperhatikan jurusan kuliah Saudara, silakan menghubungi Klinik Pengembangan Desain Kemasan dan Merek Ditjen IKM (021 5255509 ext 2361). Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi. Seperti yang saya baca bahwa Indonesia saat ini menjalin kerja sama bidang UMKM dengan Republik Seychelles. Saat ini saya sedang membutuhkan data terkait implementasi yang telah dilakukan dibidang UMKM antara Indonesia dengan Seychelles. Apakah saya bisa mendapatkan nota kesepahaman terkait kerjasama antara Indonesia dengan Seychelles ini. Terimakasih.

Dwi Nur Utami (Bandung)

Jawaban:

Terkait kerja sama antara Indonesia dan Republik Seychelles dalam bidang IKM, dapat kami informasikan bahwa Ditjen IKM Kemenperin dengan JJ Spirit Foundation telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 27 April 2015 di Seychelles. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi antar kedua pihak di sektor kerajinan, fesyen, tekstil, industri berbasis agro,

dan industri olahan ikan, bimbingan teknis dan penguatan kapasitas SDM, pertukaran pemuda antara Indonesia dan Seychelles pada sektor industri, penyediaan pasokan mesin dan peralatan dari Indonesia ke Seychelles, serta meningkatkan kerjasama business to business (B to B) bagi IKM antar kedua negara.

Salah satu tindak lanjutnya adalah penyelenggaraan program Seychelles Young Leadership Program yang diselenggarakan pada 7-29 Maret 2016 yang mengirim sejumlah delegasi dari Seychelles belajar tentang IKM di Bogor, Bandung, Sukabumi, dan Sidoarjo.

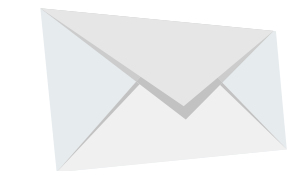
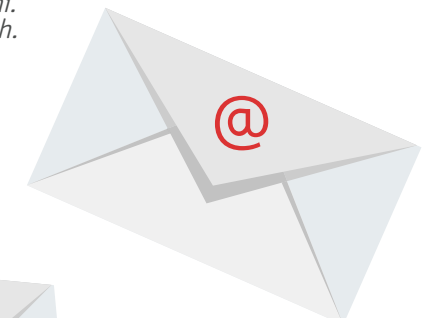
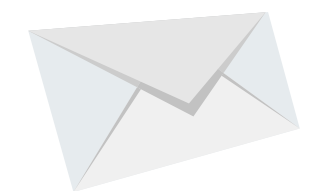
Adapun untuk dokumen nota kesepahaman, mohon menghubungi Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Ditjen IKM di nomor 021-5255351 / 021-5255509 ext 2360. Terima kasih.

Saya TPL STMI angkatan 2011. Saya saat ini sudah bekerja di salah satu unit Hotel Santika di Belitung. Saya ingin menonaktifkan BPJS Kesehatan saya yang sebelumnya terdaftar di Kemenperin untuk kemudian dialihkan ke perusahaan saya saat ini. Mohon bantuannya. Terima kasih.

Arief Rochman Hakim (Belitung)

Jawaban:

Dapat kami informasikan bahwa sehubungan dengan prosedur penonaktifan BPJS langkah pertama adalah untuk menghubungi Dinas Perindag Provinsi Bangka Belitung untuk penonaktifan BPJS-nya. Setelah itu, mohon meminta kepada perusahaan tempat Saudara bekerja sekarang untuk segera mendaftarkan kembali BPJSnya. Adapun nomor BPJS Saudara tidak akan berubah, hanya dibuat mutasi pengalihan BPJS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.



MAKING INDONESIA 4.0

Menuju Top 10
Ekonomi Global Tahun 2030



Saat peluncuran Making Indonesia 4.0 di Jakarta pada 4 April lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sempat berpantun di hadapan Presiden Joko Widodo dan para undangan Indonesia Industrial Summit 2018.

“Bukan kebetulan, peluncuran dilaksanakan pada tanggal 4, bulan 4. Kita sebut pat-pat gulipat, siapa cepat dia dapat,” kata Menperin di ujung laporannya, yang disambut tepuk tangan dan tawa hadirin, termasuk Presiden.

Pantun itu mengandung makna yang cukup dalam. Selain 4/4 merupakan angka menarik dan momen yang mudah diingat, Menperin ingin mengingatkan bahwa kecepatan akan menentukan hasil.

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang dinilai sigap dan serius mempersiapkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Nama ini diadopsi dari istilah gelombang industri generasi keempat atau Industri 4.0.

Menurut Presiden, nama program ini sangat tepat karena dua hal, yakni ‘making’ dapat

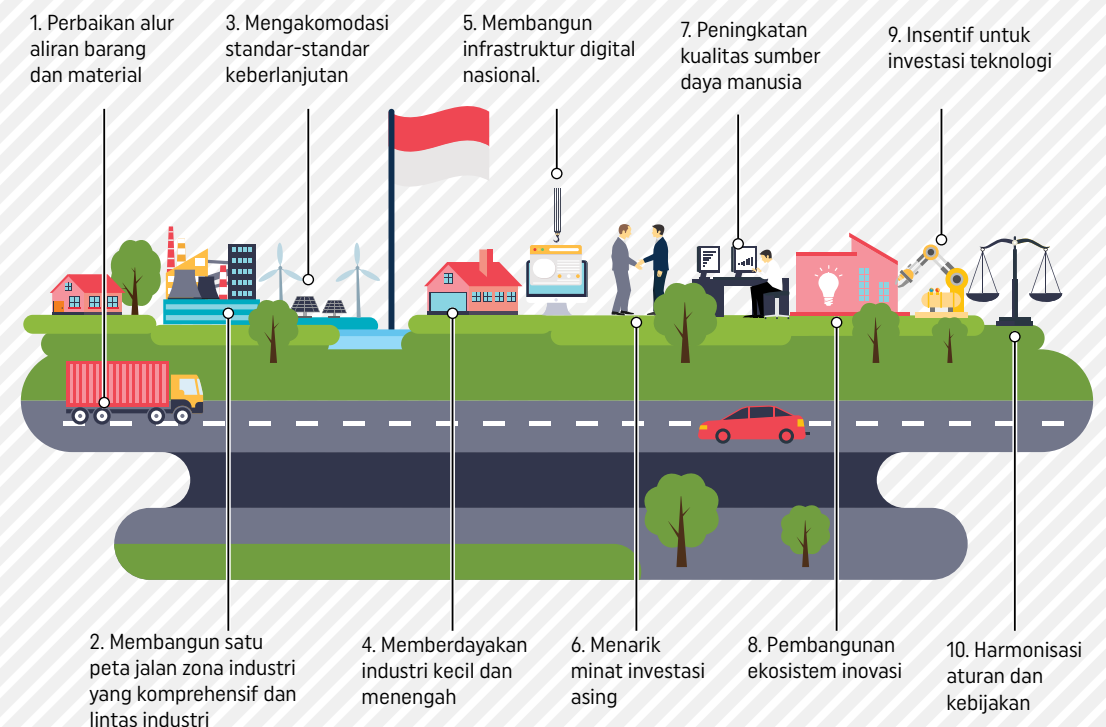
diartikan membuat, membangun, atau mewujudkan sesuatu di mana dalam hal ini diartikan sebagai membangun kembali perindustrian.

Kedua, kombinasi ‘making’ dengan ‘Indonesia’ berarti mewujudkan, membangun Indonesia ke era baru, yaitu Indonesia 4.0, yang di dalamnya terdapat beberapa aspirasi besar untuk merevitalisasi industri Indonesia secara menyeluruh.

Kepala Negara berharap, implementasi Industri 4.0 akan membawa Indonesia mencapai Top 10 ekonomi global pada tahun 2030. Pada saat itu, ekspor netto diharapkan kembali ke angka 10% dari PDB, peningkatan produktivitas dengan adopsi teknologi dan inovasi, serta pembukaan 10 juta lapangan kerja baru.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Making Indonesia 4.0 menjadi strategi Indonesia memasuki era

10 Inisiatif Nasional dalam Making Indonesia 4.0



5 Sektor Unggulan Industri 4.0



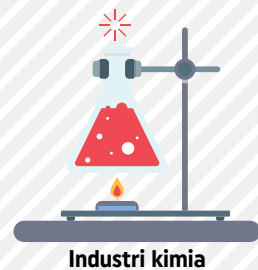
Industri makanan dan minuman



Industri tekstil dan pakaian



Industri otomotif



Industri kimia



Industri elektronik



digital yang mengubah peta persaingan global saat ini. “Untuk memenangkan kompetisi global, kuncinya adalah peningkatan nilai tambah,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan industri nasional membutuhkan konektivitas serta interaksi melalui teknologi, informasi dan komunikasi yang terintegrasi serta dapat memanfaatkan di seluruh rantai nilai manufaktur guna mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk.

INDUSTRI PERCONTOHAN

Sebagai roadmap, Making Indonesia 4.0 akan memberikan arah yang jelas bagi pengembangan industri nasional di masa depan, terutama pada lima sektor manufaktur yang dijadikan percontohan.

Kelima sektor itu yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika.

Sektor ini dipilih berdasarkan evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangannya, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar.

Penyusunan peta jalan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan.

“Dalam proses penyusunannya, kami juga berdiskusi dengan banyak pihak, seperti Fraunhofer, JICA, JETRO, dan secara khusus dengan AT Kearney,” ungkap Airlangga.

Sesuai saran Presiden, lanjut Menperin, pihaknya melakukan diskusi dan pendekatan dengan negara-negara yang menjadi mitra utama Indonesia, seperti Jepang, Singapura dan China untuk mendapat masukan konstruktif.

“Secara khusus, kami juga mengikuti kegiatan internasional seperti World Economic Forum. Mereka semua menyambut positif inisiatif ini, bahkan meminta Indonesia berbicara di World Economic Forum ASEAN akhir tahun ini,” ungkapnya.

Dengan partisipasi aktif dari seluruh pihak, Menperin optimistis implementasi Industri 4.0 di Indonesia atau Making Indonesia 4.0 akan berjalan sukses dan sesuai dengan sasaran.

Implementasi Making Indonesia 4.0 ditargetkan mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi (PDB) per tahun akan naik dari baseline 5 persen menjadi 6-7 persen pada periode 2018-2030.

Dari capaian tersebut, industri manufaktur diproyeksikan berkontribusi sebesar 21-26 persen terhadap PDB pada tahun 2030.

Pertumbuhan PDB pun bakal digerakkan oleh kenaikan

signifikan pada ekspor netto, di mana rasio ekspor netto terhadap PDB pada tahun 2030 ditargetkan mencapai 5-10 persen.

Sasaran lain dari implementasi Making Indonesia 4.0 adalah pembukaan 7-19 juta lapangan pekerjaan baru, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur pada 2030 seiring dengan pertumbuhan ekspor.

Untuk mencapai target tersebut, Menperin mengakui industri nasional membutuhkan banyak pembenahan, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing.

Teknologi yang perlu dikuasai untuk menopang implementasi Industri 4.0, yakni Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, Teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing.

10 INISIATIF NASIONAL

Di samping aspek teknologi, Making Indonesia 4.0 akan didukung 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur.

Inisiatif itu mencakup perbaikan alur aliran barang dan material, membangun peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan, memberdayakan industri kecil dan menengah, serta membangun infrastruktur digital nasional.

Kemudian, menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, serta harmonisasi aturan dan kebijakan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Presiden menjadikan Making Indonesia 4.0 sebagai agenda nasional, yang perlu dijalankan secara bersinergi.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan Kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah dan pelaku usaha, untuk mendukung penuh program ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Peluncuran Making Indonesia 4.0 itu termasuk dalam rangkaian acara Indonesia Industrial Summit 2018. Kegiatan ini diikuti 1.200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, dipadu dengan pameran serta diskusi mengenai sosialisasi konsep, potensi dan kesiapan implementasi Industri 4.0 di sektor manufaktur.

Selain Menperin, beberapa menteri Kabinet Kerja juga memberikan pemaparan, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

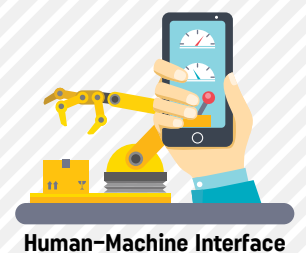
Dari pelaku industri, antara lain PT Siemens Indonesia, Barry Callebaut, PT GE Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk., PT Pan Brothers, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), IBM Indonesia, PT Astra Otoparts, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Cisco Systems Indonesia, dan PT Samsung Electronics Indonesia.

Adapun dari kalangan akademisi, di antaranya Prof. Drajad Irianto dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Teuku Yuri Zagloel dari Universitas Indonesia, dan Politeknik Manufaktur Astra. Kemenperin juga mengundang konsultan global AT Kearney untuk memberikan pemaparan tentang benchmarking implementasi Industri 4.0. **mi**

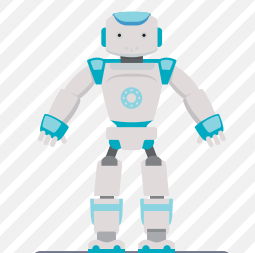
5 Teknologi Penopang Industri 4.0



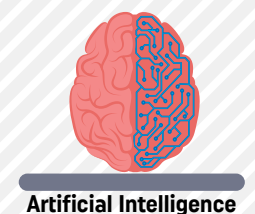
Internet of Things



Human-Machine Interface



Teknologi robotik & sensor



Artificial Intelligence



Teknologi 3D Printing

MANUFAKTUR TETAP JADI ANDALAN

Hingga tahun 2017 berakhir, industri pengolahan nonmigas atau manufaktur di dalam negeri terus menggeliat. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto tetap dominan sehingga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada kuartal IV tahun 2017 mencapai 5,14 persen. Angka ini jauh melampaui pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya 3,91 persen.

Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan kinerja manufaktur cukup kuat. Data BPS menunjukkan, industri manufaktur besar dan sedang tumbuh 4,74 persen sepanjang tahun 2017.

Beberapa industri pertumbuhannya melampaui pertumbuhan ekonomi. Misalnya, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri berbasis hilirisasi baja, industri pulp dan kertas, dan industri perhiasan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, peran manufaktur terhadap perekonomian (PDB) pada 2017 masih signifikan yakni 20,16 persen atau tertinggi dibandingkan dengan sektor utama lainnya, seperti pertanian 13,14 persen, perdagangan 13,01 persen, konstruksi 10,38 persen, dan pertambangan 7,57 persen.

Tidak hanya itu, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar ekspor. Pada 2017, nilai ekspor industri ini tercatat USD125 miliar atau 76 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar USD168,73 miliar.

Catatan positif ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan kemudahan berusaha sehingga mendorong investasi ke dalam negeri dan ekspor.

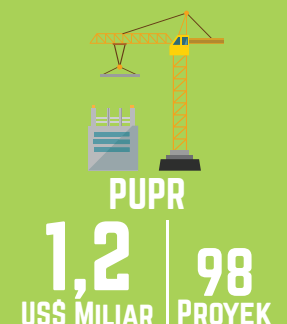
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, hingga 14 Desember 2017, komitmen investasi baru yang masuk ke dalam negeri mencapai USD42,6 miliar dengan jumlah proyek 1.054. Angka ini melonjak 23,7 persen dibandingkan dengan capaian 2016.

Sektor perindustrian memberikan kontribusi tertinggi terhadap realisasi investasi sepanjang 2017, yakni mencapai USD21,6 miliar dengan 256 proyek. Sementara itu, sektor pariwisata menyumbang USD17 miliar dengan 159 proyek, pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) senilai USD1,2 miliar dengan 98 proyek.

KINERJA MANUFAKTUR



INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR USAHA 2017



Selanjutnya, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) USD1,18 miliar dengan 32 proyek, perdagangan USD0,92 miliar dengan 427 proyek, dan pertanian USD0,27 miliar dengan 22 proyek, serta sektor lainnya sebesar USD0,43 miliar dengan 60 proyek.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berbisnis guna menarik investasi ke dalam negeri, khususnya di sektor manufaktur.

“Investasi akan mendorong ekspansi manufaktur sehingga ekonomi nasional tumbuh,” ujarnya. Investasi ini sangat penting karena berdampak luas terhadap perekonomian, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan penerimaan negara.

Agar Indonesia menarik di mata investor, pemerintah mengulirkan berbagai kebijakan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum. Industri juga didorong memanfaatkan teknologi terkini untuk

meningkatkan mutu produk, efisiensi dan produktivitas, serta memberikan insentif fiskal.

Upaya itu didukung dengan ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, sumber daya manusia (SDM) kompeten, serta kemudahan akses pasar dan pembiayaan. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi dijaga dan ditingkatkan agar permintaan terhadap produk industri semakin tinggi.

Melalui berbagai upaya tersebut, Menperin optimistis investasi asing dan domestik di sektor

manufaktur akan terus meningkat, dari sekitar Rp283,71 triliun pada 2017 menjadi Rp352,16 triliun pada 2018 dan mencapai Rp387,57 triliun pada 2019.

ORIENTASI EKSPOR

Sejalan dengan itu, Kemenperin memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor, seperti sektor tekstil, produk tekstil, dan alas kaki yang sampai sekarang tetap menjadi andalan karena memiliki daya saing tinggi.

“Tren ekspor industri terus meningkat. Kami berharap tahun ini bisa memenuhi target sebesar USD135 miliar atau naik sekitar 8 persen dari perolehan tahun lalu. Kami proyeksikan ekspor bisa mencapai USD143,22 miliar pada 2019,” ungkap Airlangga.

Komoditas yang mendominasi ekspor industri pengolahan sepanjang tahun 2017, yaitu minyak kelapa sawit yang berkontribusi tinggi terhadap ekspor industri makanan senilai Rp272 triliun, diikuti ekspor produk pakaian Rp90 triliun.

Selanjutnya, produk industri karet, barang karet, serta barang dari karet dan plastik senilai Rp66 triliun, produk industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia Rp59 triliun, serta produk industri logam Rp51 triliun.

Negara tujuan utama ekspor Indonesia saat ini adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura.

Pertumbuhan dan ekspor industri yang naik tajam terjadi pada sektor pengolahan logam dan mineral, didorong



Apa Kata Pelaku Industri?

Pasar mobil pada tahun 2018 diperkirakan stabil atau minimal sama seperti 2017 sebab kondisi perekonomian nasional juga relatif stabil.

Mobil sudah menjadi bagian dari ekonomi dan untuk tahun ini prospeknya masih cukup baik. Pasar juga semakin semarak karena ada dua pemain baru, yaitu Wuling dan Sokon asal Tiongkok. Ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan.



Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto

oleh kebijakan hilirisasi industri yang dicanangkan Kementerian Perindustrian.

Indonesia sudah memiliki beberapa klaster industri baja, sektor yang dinilai strategis karena merupakan induk dari segala industri (mother of industry). Di Cilegon misalnya, kapasitas produksi baja saat ini mendekati 5 juta ton per tahun dan ditargetkan mencapai 10 juta ton pada tahun 2025.

Ada juga klaster industri baja di Morowali, Sulawesi Tengah, dan kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara yang segera menghasilkan nickel pig iron sebanyak 2 juta ton pada 2018.

Dalam tahun politik, uang beredar biasanya akan meningkat dan diharapkan mendorong konsumsi makanan dan minuman.

Pemerintah perlu memastikan Pilkada yang dilaksanakan di 171 wilayah berlangsung aman dan damai. Jika ini terjadi, GAPMMI optimistis industri mamin bisa tumbuh lebih tinggi mencapai 10 persen atau pada 2018.



Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman

Sebelumnya, Indonesia mengekspor nickel ore, tetapi kini sudah memproduksi 3 juta ton nickel pig iron dan 1,5 juta ton produk antara berupa stainless plat.

Dengan demikian, pada akhir tahun ini, Indonesia akan mempunyai baja berbasis nikel hampir 4 juta ton atau setara dengan produksi seluruh Eropa. Pada 2019, produksinya ditargetkan mencapai 5 juta ton sehingga berpotensi menjadi produsen stainless steel terbesar kedua di dunia.

Tidak hanya itu. Di Batulicin, Kalimantan Selatan, juga sedang dibangun pabrik carbon steel dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun.

Pelaku industri optimistis penjualan tekstil dan produk tekstil (TPT) pada 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kegiatan Pilkada Serentak 2018 diharapkan mendorong penjualan hingga 10 persen.

Tingginya permintaan TPT dapat memberikan nafas segar bagi pengusaha, setelah penjualan domestik sepanjang tahun lalu dinilai kurang menguntungkan.



Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat

Merujuk data BPS, industri logam dasar termasuk subsektor yang mencatat pertumbuhan tinggi yakni 7,05 persen pada kuartal IV tahun 2017. Capaian ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen pada 2017.

Industri logam bersama mesin dan elektronik termasuk subsektor yang diminati investor, terlihat dari nilai investasinya mencapai Rp64,10 triliun atau terbesar kedua setelah industri makanan senilai Rp64,74 triliun.

Menurut Menperin, alasan utama mengapa investor asing menanamkan modal di Indonesia karena pasar domestik dinilai potensial dan terus bertumbuh. Selain itu, upah tenaga

kerja masih kompetitif dan didukung supply base untuk industri perakitan.

“Pemerintah terus berkomitmen memperkuat daya saing investasi di Tanah Air. Peringkat ease of doing business kita tingkatkan terus, di samping memberikan insentif fiskal sebagai daya tarik bagi industri,” ujar Airlangga.

Insentif fiskal itu misalnya pemberian fasilitas tax allowance untuk sektor industri padat karya berorientasi ekspor, tax allowance sebesar 200 persen bagi industri yang mengembangkan pendidikan vokasi, dan tax allowance 300 persen bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan (R&D).

Menperin menargetkan, nilai investasi yang bisa ditarik dari 13 kawasan industri (KI) akan mencapai Rp250,7 triliun pada 2018.

Ke-13 KI itu, yakni KI Morowali Sulawesi Tengah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Sumatera Utara, KI Bantaeng Sulawesi Selatan, KI JIIPE Gresik Jawa Timur, KI Kendal Jawa Tengah, dan KI Wilmar Serang Banten.

Selanjutnya, KI Dumai Riau, KI Konawe Sulawesi Tenggara, KI/KEK Palu Sulawesi Tengah, KI/KEK Bitung Sulawesi Utara, KI Ketapang Kalimantan Barat, KI/KEK Lhokseumawe Aceh, dan KI Tanjung Buton Riau.

Pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi di kawasan industri tersebut, antara lain insentif fiskal dan nonfiskal serta pembentukan satgas untuk penyediaan gas, listrik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain.

“Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam negeri dan mewujudkan Indonesia sentris,” kata Airlangga.

Mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, Kemenperin memprediksi total tenaga kerja yang terserap pada 2017 sekitar 17,01 juta orang, naik dibandingkan tahun 2016 sebanyak 15,54 juta orang. Capaian ini ikut mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia secara signifikan.

“Dari sisi geoekonomi, Indonesia sudah masuk dalam one trillion club. Saat ini, pertumbuhan ekonomi kita bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

SUMBANGAN PAJAK

Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar PDB dan ekspor, industri pengolahan memiliki andil besar terhadap penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas.

Sepanjang 2017, penerimaan pajak dari sektor manufaktur tercatat tumbuh 17,1 persen. Ini menunjukkan manufaktur merupakan wajib pajak yang patuh.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp1,151 triliun, sementara PPh dari sektor nonmigas sebesar Rp596,89 triliun.

Kontribusi PPh industri pengolahan nonmigas terhadap penerimaan pajak pada 2017 mencapai 31,8 persen, melampaui sektor perdagangan 19,3 persen, jasa keuangan 14,0 persen, dan pertanian 1,7 persen.

Sumbangsih tersebut, antara lain melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor.

Sebagai contoh, industri berbasis agro dan tambang mineral menghasilkan nilai tambah dari produk hilirnya seperti produk turunan kelapa sawit dan baja. Jumlah produk hilir kelapa sawit, misalnya, bertambah menjadi 154 produk selama 2015-2017 dari sekitar 126 produk pada 2014.

Adapun nilai tambah tambang mineral, di antaranya dari produksi industri smelter dengan produk turunan berupa stainless steel berkapasitas 2 juta ton per tahun pada periode 2015-2017. Jumlah ini naik dari tahun 2014 yang hanya 65 ribu ton produk setengah jadi berupa feronikel dan nickel matte.

SESUAI JALUR

Perkembangan di sektor manufaktur itu menunjukkan bahwa perekonomian nasional telah berada di jalur yang benar (on the track) dan mengarah pada tren pertumbuhan positif.

“Dari sisi geoekonomi, Indonesia sudah masuk dalam one trillion club. Saat ini, pertumbuhan ekonomi kita bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN,” ungkap Menperin.

Perekonomian nasional juga terus mengalami perbaikan dari berbagai aspek selama 15 tahun terakhir. Capaian positif itu, antara lain Indonesia menjadi negara populasi tenaga kerja terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah mencapai 30 juta pekerja dan rata-rata gaji pekerja telah naik dalam dua kali lipat.

Selama 15 tahun terakhir pula, nilai investasi Indonesia telah naik 13 kali lipat dari 22 persen menjadi 34 persen pada PDB nasional.

Pertumbuhan konsumsi masyarakat pun meningkat delapan kali lipat dan saat ini berkontribusi 55 persen pada PDB. Kondisi ini diikuti dengan kapitalisasi pasar modal yang naik 15 kali lipat atau setara dengan USD500 miliar.

Dari sisi manufacturing value added (MVA), Indonesia juga menempati posisi tertinggi dibanding negara-negara di ASEAN. MVA Indonesia mencapai 4,84 persen, sedangkan rata-rata di ASEAN berkisar 4,5 persen. Bahkan, untuk tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-9.

Apalagi, pengelolaan ekonomi dinilai semakin membaik mulai dari peringkat ease of doing business yang melonjak ke posisi 72 pada 2017 dan peringkat layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P).

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NO.1 TAHUN 2018

TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM
IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN (**TAX ALLOWANCE**) UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI

Prosedur Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance):

1

Memiliki Nilai Investasi Tinggi

2

Memiliki Penyerapan
Tenaga Kerja Tinggi

3

Memiliki Kandungan Lokal
bahan baku, bahan penolong,
atau mesin sama
dengan/lebih dari

20%

4

Mengajukan Surat Keterangan
yang memuat informasi:

- ✓ Kesesuaian bidang usaha Industri dan cakupan produk
- ✓ Pemenuhan kriteria;
- ✓ dan/atau pemenuhan persyaratan.

5

Permohonan Surat Keterangan disampaikan melalui
Unit Pelayanan Publik dengan melampirkan:

- ✓ Surat kuasa bermeterai apabila permohonan bukan dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan
- ✓ Surat pernyataan bermeterai berisi penjelasan pemenuhan kriteria
- ✓ Surat pernyataan bermeterai berisi penjelasan pemenuhan persyaratan
- ✓ Fotokopi izin prinsip serta perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta perubahannya;
- ✓ Fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
- ✓ Fotokopi akta pendirian perusahaan serta perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Menkumham atau pengadilan negeri.

6

Dokumen permohonan Surat
Keterangan ditelaah oleh
Direktorat Pembina Industri
maksimal 10 hari kerja.

7

Diterbitkan

Apabila dokumen benar
dan memenuhi kriteria
dan persyaratan, paling
lambat 1 (satu) hari kerja.

Tidak Diterbitkan

Apabila dokumen tidak
benar, Dirjen Pembina
Industri akan menerbitkan
surat penolakan paling
lambat 1 (satu) hari kerja.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN
STANDARDISASI INDUSTRI SECARA WAJIB

Jenis Pengawasan

- ✓ Pengawasan di pabrik
- ✓ Koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait
- ✓ Pengawasan produk tertentu di daerah pabean oleh instansi di bidang kepabeanan

Tata Cara Pengawasan

Pemeriksaan Dokumen

Dokumen legalitas perusahaan

- ✓ Akta pendirian perusahaan atau perubahannya
- ✓ Izin Usaha Industri
- ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak

Dokumen kesesuaian mutu terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib berupa*:

- ✓ SPPT-SNI
- ✓ Laporan Hasil Uji (LHU) atau Sertifikasi Hasil Uji (SHU), atau
- ✓ Sertifikasi tanda kesesuaian

*Diterbitkan oleh LSPro dan/atau Laboratorium Penguji; dan/atau

Dokumen pertimbangan teknis atau surat keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib

Pelaksanaan Uji Petik

- ✓ Pemeriksaan fisik produk, dan/atau
- ✓ Pengujian kesesuaian penerapan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib ke Laboratorium Penguji

Pelaksanaan pengawasan

- ✓ **Di pabrik:** Paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun
- ✓ **Di pasar:** Secara berkala (minimal sekali setahun) dan/atau secara khusus.

Sanksi atas produk tidak memenuhi ketentuan:

- ✓ Menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan
- ✓ Menarik seluruh barang di pasar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan
- ✓ Menghentikan kegiatan impor barang paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan
- ✓ Melakukan perbaikan terhadap barang dan/atau jasa industri dan meminta lembaga lembaga penilaian kesesuaian untuk menilai kesesuaian mutu produk.

Sanksi administratif

- ✓ Denda administratif
- ✓ Penutupan sementara
- ✓ Pembekuan IUI
- ✓ Pencabutan IUI

Learning Inno Summit 2018



KERJA SAMA KEMENPERIN-RUANGGURU

PROGRAM E-SMART IKM SEMAKIN PINTAR

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk memacu pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Salah satu program unggulannya adalah e-Smart IKM.

Sejak program itu diluncurkan pada Januari 2017, jumlah IKM yang mengikuti workshop e-Smart IKM mencapai 1.700 peserta, melampaui target sebanyak 1.000 IKM hingga akhir tahun lalu.

Pada tahun 2018, Kemenperin ingin merangkul lagi 4.270 IKM dan bertambah menjadi 5.240 IKM pada tahun berikutnya. Dengan demikian, jumlah IKM yang terlibat pada 2019 mencapai 10 ribu, dan 30 ribu produk IKM lokal akan dapat diakses konsumen melalui marketplace.

Program e-Smart IKM yang digagas oleh Kemenperin ini merupakan sistem berbasis data yang meliputi sentra dan produk IKM yang tersaji secara terintegrasi dengan marketplace lokal.

Untuk menyukseskan program ini, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan sejumlah marketplace lokal, yakni Bukalapak, Blanja, Tokopedia, Blibli, dan Shopee.

Menurut Direktur Jenderal IKM Gati Wibawaningsih, program e-Smart IKM dapat membantu Kemenperin mencapai target pertumbuhan IKM di atas 10 persen pada tahun 2018. Target ini naik dibandingkan dengan kinerja IKM sepanjang 2017 yang berada di kisaran 9 persen.

Melalui e-Smart IKM, Kemenperin mempermudah dan memperluas akses pasar IKM melalui pemasaran online. Selain itu meningkatkan keunggulan IKM di pasar domestik dan global karena

memperoleh ketersediaan bahan baku, teknologi dan modal.

Berbagai manfaat bisa dirasakan oleh pelaku IKM yang mengikuti program ini, seperti mendapatkan promosi online, mengurangi biaya promosi dan pemasaran, serta mendapatkan pembinaan dari pemerintah.

Program e-Smart IKM mengusung sembilan produk unggulan dalam negeri yang tengah dipacu pengembangannya melalui pasar online, yaitu kosmetik, fesyen, makanan, minuman, kerajinan, perhiasan, mebel, herbal dan produk logam.

Tahun ini, salah satu produk IKM yang akan digenjot pertumbuhannya adalah fesyen, khususnya busana muslim. Hal ini sejalan



dengan target Indonesia yang ingin menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020.

Selain menyediakan platform e-commerce, Kemenperin juga memberikan bimbingan teknis kepada para pelaku IKM melalui kegiatan lokakarya atau workshop e-Smart IKM di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini sudah digelar di beberapa kota, di antaranya Padang, Palembang, Sidoarjo, Bandar Lampung, Buleleng, Balikpapan, Medan, Makassar, dan segera disusul kota-kota lain di Indonesia.

Dalam workshop ini, para pelaku IKM akan dibimbing langsung oleh tenaga ahli dari marketplace dalam negeri mengenai pemanfaatan teknologi digital yang efektif.

GANDENG RUANGGURU

Tidak hanya itu, Kemenperin juga memberikan pembinaan kepada pelaku IKM mengenai pemasaran, pemilihan bahan baku hingga manajemen bisnis secara gratis melalui video.

Untuk itu, Ditjen IKM Kemenperin telah menjalin kerja

sama dengan PT Ruang Raya Indonesia (ruangguru.com) sejak 28 Desember 2017. Melalui kerja sama ini, Ruangguru dijadikan platform untuk membuat video pelatihan yang dapat diakses oleh pembina IKM, pelaku IKM, bahkan pekerja IKM.

Ruang lingkup kerja sama, antara lain pembuatan Konten Digital Pelatihan Industri (KDPI) seperti video, soal, dan rangkuman. Adapun, konten video akan dibuat oleh unit satuan kerja di Kemenperin.

Selain mendukung program e-Smart IKM, Ruangguru bakal menjadi rujukan bagi guru sekolah menengah kejuruan yang jumlahnya mencapai 30 persen dari seluruh tenaga pengajar di Indonesia.

"Kami berharap, upaya ini turut memacu daya saing Indonesia melalui penyiapan kualitas dan ketersediaan pekerja dengan keterampilan tinggi," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat menyaksikan penandatanganan kerja sama dengan Ruangguru.

Ruangguru merupakan platform digital dan multimedia yang berdiri sejak tahun 2014. Platform

ini menyediakan layanan dan konten pendidikan yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android dan iOS.

Hingga kini, Ruangguru sudah memiliki 6 juta murid di seluruh Indonesia dan melibatkan sekitar 150.000 guru di seluruh Indonesia.

CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Bevara berharap pelaku IKM di pelosok daerah juga dapat belajar melalui aplikasi Ruangguru. Dia optimistis program ini akan berhasil sebab caranya mudah serta menghemat waktu dan biaya.

"Banyak IKM yang belum memiliki kemampuan dan pengetahuan memadai untuk memasarkan produk. Padahal produk mereka bagus dan mampu bersaing di pasar. Kami berharap aplikasi Ruangguru bisa membantu Kemenperin meningkatkan daya saing IKM di dalam negeri," ujar Belva. mi

A photograph of the Bandung Techno Park building. The building is a modern, curved structure with a glass facade. A large sign on the upper part of the building reads "BANDUNG TECHNO PARK". In the foreground, there are lush green trees and a red horizontal railing. The sky is overcast.



Techno Park juga diharapkan mendukung pelaksanaan program pendidikan vokasi link and match yang diinisiasi oleh Kemenperin. Pada 2017, Ditjen ILMATE telah memfasilitasi pelatihan 540

orang di Bandung, Denpasar, Semarang, Surabaya, Malang, Jakarta, Batam, Makassar dan Pondok Pesantren Nurul Iman di Bogor.

HADAPI INDUSTRY 4.0

Tidak hanya itu, hasil riset dan inovasi dari Techno Park diperlukan untuk membantu

dan pengembangan fintech. “Kita tidak perlu khawatir ekonomi digital mengurangi lapangan kerja, sebab online marketplace dan business process outsourcing (BPO) bisa melibatkan ribuan orang,” ujarnya.

Menteri Airlangga mengajak generasi muda agar bisa gaul dalam bahasa digital, seperti bahasa Inggris, statistik,

teknologi smartphone yang sangat cepat ini melalui riset dan inovasi teknologi.

Sejauh ini, sudah ada beberapa merek nasional yang memiliki branding cukup kuat di pasar menengah bawah ataupun menengah atas, seperti Polytron, Evercooss, dan Advan.

Kemenperin mendukung penuh eksistensi merek nasional tersebut agar mampu bersaing di pasar lokal dan ekspor serta terus berkembang.

Berdasarkan data Kemenperin, industri telematika di dalam negeri tumbuh cukup pesat. Sampai dengan 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek dan 37 pemilik merek baik global maupun nasional, dengan total nilai investasi Rp7 triliun dan menyerap tenaga kerja 13 ribu orang.

Selain memacu industri hardware, pemerintah juga mendorong pengembangan industri software,

industri dalam negeri meningkatkan daya saing global di tengah era Industry 4.0.

Untuk menghadapi era Industry 4.0, Kemenperin sendiri telah melakukan berbagai upaya, antara lain penguatan sektor hulu, identifikasi rantai pasok global dan zona industri, penguatan akses pasar melalui program e-Smart IKM, serta mengusulkan insentif fiskal untuk industri yang berinvestasi di bidang inovasi dan vokasi.

Tujuannya yakni mendorong entrepreneur, penguasaan pasar,

dan koding. Materi tersebut bisa dipelajari dalam kurun enam bulan.

“Indonesia punya kesempatan untuk menjadi champion di Asia karena potensi besar dari pasar smartphone dan jumlah perguruan tinggi,” ungkapnya.

Sebagai gambaran, tutur Menperin, penjualan smartphone di dalam negeri mencapai 60 juta unit per tahun dengan pengguna lebih dari 71 juta orang. Indonesia bisa mengambil kesempatan bisnis dari siklus



konten dan animasi. Ini dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.

Dalam beleid itu, Kemenperin tidak hanya menekankan skema TKDN hardware, tetapi TKDN software dan investasi. “Melalui skema software ini, kami ingin memacu untuk peningkatan inovasi dalam sehingga mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan,” kata Menperin. 



EKONOMI & BISNIS

BERSINERGI MEMBANGUN INDUSTRI KERETA API

Industri kereta api di dalam negeri terus berkembang, baik dari sisi bisnis maupun kemampuan teknologinya. Perkembangan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah menetapkan industri alat transportasi sebagai salah satu sektor andalan masa depan, termasuk kereta api.



Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Dalam PP itu, pemerintah akan mengembangkan kereta api perkotaan, seperti light rail transit (LRT), monorail, dan mass rapid transport (MRT) pada tahun 2015-2019. Pada periode selanjutnya 2020-2035, pengembangan akan difokuskan pada kereta listrik dan magnetic levitation (maglev).

Saat ini, pemerintah tengah gencar membangun LRT di Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Palembang. Pemerintah juga segera merampungkan proyek MRT Jakarta, serta membangun jaringan kereta api di beberapa daerah.

Pembangunan infrastruktur berbasis rel yang gencar beberapa tahun terakhir turut memacu tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sebagai gambaran, TKDN proyek LRT Jabodebek ditargetkan lebih dari 65 persen pada tahun 2019.

Realisasi proyek ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan multiplier effect terhadap perekonomian nasional, termasuk keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM).

Guna merealisasikan sasaran yang ditetapkan dalam RIPIN, pemerintah telah menyusun program strategis, yakni menerapkan kebijakan terkait penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan komponen pendukung.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan desain dan engineering, serta menciptakan regulasi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.

SINERGI BUMN

Pemerintah juga mendorong sinergi antara BUMN dengan pemangku kepentingan terkait guna mendorong industri perkeretaapian nasional, termasuk swasta, industri penunjang dan IKM, serta perguruan tinggi.

Sinergi tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja sama dalam pembangunan proyek LRT Jabodebek antara PT Industri

Kerja sama bisnis dan promosi digencarkan terutama ke pasar potensial, seperti Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Zambia, Nigeria dan Mesir.

Kereta Api (Persero) atau Inka dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Salah satunya adalah kontrak kerja sama pengadaan sarana LRT Jabodebek antara PT Inka dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta pengadaan material dan komponen kereta antara PT Inka dengan PT Barata Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Pindad.

Selain itu, kerja sama antara PT Inka dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan, kerja sama peningkatan TKDN antara PT Inka dan IKM Penerima Program National Interest Account (NIA), serta kerja sama program vokasi antara PT Inka dan SMK di Jawa Timur.

PT Inka juga menggandeng BPPT, Kemenristek Dikti, perguruan tinggi (ITB, ITS, UNS dan UGM) untuk kerja sama konsultasi dan riset bersama, serta kerja sama konsultasi dan pendampingan pembangunan Workshop INKA 2 di Banyuwangi dengan BPPK Perwakilan Jawa Timur.

Penandatanganan kontrak kerja sama tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di sela-sela kunjungan kerja di PT Inka Madiun, Jawa Timur, pada 18 Januari silam.

Melalui kerja sama itu, Menperin mendorong PT Inka terus melakukan pembinaan terhadap IKM komponen sehingga mampu menghasilkan produk sesuai standar dan bisa digunakan di industri perkeretaapian.



“Pembinaan IKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab kita bersama dan seyogyanya juga menjadi komitmen kita untuk maju secara bersama,” kata Menperin.

Dukungan Kemenperin terhadap industri perkeretaapian dan IKM komponen antara lain memfasilitasi pembentukan Asosiasi Industri Manufaktur dan Penunjang Perkeretaapian Indonesia atau Indonesia Railway Component Manufacture Association (IRCMA) pada 2016.

Selain itu, Kemenperin membina Perkumpulan Industri Kecil Kereta Api (PIKKA) yang terdiri dari berbagai industri di bidang metal, karet, plastik serta lembaga riset dan konsultan. Anggota PIKKA berjumlah sekitar 50 industri komponen perkeretaapian, termasuk di dalamnya PT Inka sebagai integrator.

“Asosiasi ini diharapkan mampu mendukung penyediaan komponen untuk kereta api produksi dalam negeri dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok seperti untuk proyek LRT Jabodebek dan proyek lain sehingga bisa menjadi pemain industri komponen yang berdaya saing global,” ujar Menperin.

Dalam rangka pembinaan IKM, Kemenperin juga memfasilitasi kerja sama dengan para pelaku IKM baja di Tegal dan Ceper, Jawa Tengah. Langkah ini untuk meningkatkan kemampuan IKM agar menjadi bagian rantai pasok, seperti dalam proyek LRT.



Dukungan lain yang diberikan Kemenperin adalah mendirikan Pusat Desain dan Rekayasa Industri Perkeretaapian Nasional bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PT Inka.

Fasilitas yang didirikan di kampus ITB itu antara lain untuk mendukung pelaksanaan berbagai kajian pengembangan perkeretaapian, program riset dan pengembangan produk, SDM, serta menjadi inkubator bisnis dan pengujian produk.

Berdasarkan data Kemenperin, industri penunjang dan komponen dalam negeri saat ini sudah mampu memproduksi sekitar 70 persen dari total kebutuhan komponen kereta api nasional, termasuk rangka kereta api.

Menperin menargetkan industri penunjang ini bakal mampu menyediakan sampai 80 persen dari jumlah kebutuhan komponen kereta api di dalam negeri dalam 2-3 tahun ke depan.

Apalagi, beberapa pemasok utama komponen kereta api merupakan BUMN strategis sehingga sinergi BUMN lebih mudah diwujudkan. BUMN itu, antara lain PT Pindad memasok rem, PT LEN untuk persinyalan, PT Barata untuk bogie, dan PT Krakatau Steel untuk bahan baku baja.

DUKUNGAN PT INKA

Khusus untuk mendukung proyek LRT Jabodebek, PT Inka

menyiapkan dua lini produksi dan perakitan, yang diharapkan dapat memenuhi target penyelesaian pengiriman pertama empat train set pada Maret 2019 dengan asumsi kontrak dimulai Januari 2018.

Menurut Airlangga, proyek LRT Jabodebek menjadi kesempatan bagi industri kereta api nasional untuk menunjukkan daya saingnya dalam penguasaan teknologi, termasuk dalam hal riset dan inovasi pengembangan industri berbasis rel.

“Momentum ini kami harapkan menjadi peluang peningkatan kompetensi SDM melalui program pengembangan SMK dan vokasi yang link and match dengan industri. Langkah ini juga perlu melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi,” ungkap Menperin.

Pembangunan LRT Jabodebek dan Palembang merupakan salah satu proyek strategis pemerintahan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat.

Untuk pengerjaan proyek ini, PT Inka mendapat dukungan keuangan sebesar Rp4,050 triliun dari tiga sindikasi bank, yakni dari PT BNI (Persero) Tbk, PT SMI (Persero), dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

Kepercayaan perbankan ini tidak terlepas dari potensi industri manufaktur sarana kereta api Indonesia yang termasuk pemain terbesar di Asia Tenggara. Selain mampu memenuhi kebutuhan domestik, industri kereta api nasional juga berhasil menembus ekspor, khususnya ke negara berkembang dan kawasan regional.

Guna memperluas pasar ekspor, Kemenperin memacu industri kereta api nasional agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Sejalan dengan itu, kerja sama bisnis dan promosi digencarkan terutama ke pasar potensial, seperti Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Zambia, Nigeria dan Mesir.

“Kami terus memacu industri perkeretaapian nasional agar dapat menguasai pasar domestik dan semakin berperan dalam supply chain industri perkeretaapian untuk pasar global,” ungkap Menperin. 

FARMASI BERGAIRAH, SEKTOR IKTA KIAN CERAH

Sektor industri kimia, tekstil, dan aneka (IKTA) selalu menjadi andalan investasi di sektor manufaktur nasional. Investasi di sektor ini pada 2017 saja sudah mencapai Rp94 triliun dan diproyeksikan tembus Rp117 triliun pada tahun ini.

Investasi Sektor IKTA



2017



*proyeksi

2018

Sesuai proyeksi itu, sektor IKTA berpotensi menyumbang 33 persen dari total investasi manufaktur nasional yang ditargetkan Rp352 triliun pada tahun 2018.

Sektor tersebut terutama ditopang oleh industri farmasi serta produk obat kimia dan tradisional. Subsektor ini diperkirakan tumbuh 6,38 persen atau tertinggi dibandingkan dengan subsektor IKTA lainnya.

Kontribusi industri farmasi yang signifikan seiring dengan perannya di pasar domestik dan regional. Sebagai gambaran, nilai pasar produk farmasi Indonesia ke ASEAN diperkirakan mencapai USD4,7 miliar atau 27 persen dari total pasar farmasi di kawasan ini.

Industri farmasi juga sudah mampu menyediakan 70 persen dari kebutuhan obat dalam negeri. Ini menjadi modal bagi industri farmasi nasional untuk lebih mendominasi pasar domestik atau ekspor.

Untuk meningkatkan daya saing produk farmasi nasional, Kemenperin terus memperkuat struktur industrinya, terutama di sektor hulu. Upaya strategis ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat.

Pemerintah telah menyediakan beberapa insentif fiskal, seperti tax allowance dan tax holiday guna menarik investasi dan memacu pelaku industri farmasi

mengembangkan pabrik bahan baku di Indonesia.

Direktur Jenderal IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, Indonesia berpotensi unggul apabila mengembangkan industri farmasi, herbal, dan kosmetika karena memiliki sumber daya alam untuk mendukung proses produksinya.

Keunggulan sumber daya alam ini menjadi modal utama bagi industri farmasi Indonesia untuk bersaing di pasar ekspor, sekaligus menjadi daya tarik investasi baru.

TINGKATKAN DAYA SAING

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan,

pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan terkait terus bersinergi untuk meningkatkan daya saing industri nasional, termasuk farmasi.

Sinergi itu antara lain penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, penggunaan teknologi terkini untuk mendorong peningkatan mutu, efisiensi dan produktivitas, dan pemberian fasilitas berupa insentif fiskal.

Sinergi ini juga perlu didukung dengan ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, sumber daya manusia kompeten, serta kemudahan akses pasar dan pembiayaan.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi dijaga dan ditingkatkan agar permintaan terhadap produk-produk industri semakin meningkat.

Langkah tersebut disertai didukung pula dengan program yang kini gencar dilaksanakan oleh Kemenperin, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia industri.

Berbagai upaya pemerintah sudah berhasil menarik investasi di sektor IKTA, khususnya farmasi dan bahan baku obat. Beberapa perusahaan farmasi yang telah menggelontorkan modalnya, antara lain PT Kimia Farma

Sungwon Pharmacopia senilai Rp132,5 miliar dan PT Ethica Industri Farmasi sebesar Rp1 triliun.

Di sektor kosmetika, investasi juga terus mengalir, salah satunya perluasan pabrik PT Unilever Indonesia yang menelan modal hingga Rp748,5 miliar.

Investasi di sektor industri ini bakal menciptakan efek berantai yang luas, seperti penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa dari ekspor. **mi**



PROSPEK SMELTER CERAH, INVESTASI MELIMPAH

Industri pengolahan dan pemurnian logam atau smelter di dalam negeri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga tahun 2017, sedikitnya 34 proyek smelter telah dibangun dengan total investasi Rp752,62 triliun.

Proyek smelter itu terdiri dari pengolah bijih besi, bijih nikel, bijih bauksit, konsentrat tembaga, stainless steel, dan aluminium. Dari 34 proyek tersebut, tenaga kerja yang diserap lebih dari 30 ribu orang.

Besarnya nilai tambah dan serapan tenaga kerja proyek smelter membuat pemerintah gencar mempromosikan investasi di industri ini. Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan industri smelter karena termasuk 10 besar negara di dunia dengan cadangan bauksit, nikel, dan tembaga yang melimpah.

Pengembangan proyek smelter juga sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Kementerian Perindustrian, khususnya di industri logam. Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Industri smelter berbasis logam di dalam negeri saat ini memiliki kapasitas produksi cukup besar. Berdasarkan catatan Kemenperin, kapasitas smelter

besi mencapai 7,6 juta ton per tahun, terdiri dari 3 juta ton Krakatau-Posco dan 1,2 juta ton Krakatau Steel di Cilegon dan 3 juta ton Dexin Steel di Morowali.

Kemudian, refinery alumina berkapasitas 2,3 juta ton per tahun (1 juta ton refinery Well Harvest Alumina Refinery, 300 ribu ton Indonesia Chemical Alumina, dan 1 juta ton refinery perusahaan patungan PT Antam-PT Inalum), serta smelter aluminium 1 juta ton.

Selanjutnya, smelter nikel berkapasitas tahunan 4,6 juta ton dan smelter slab stainless steel 2 juta ton, serta smelter tembaga 303 ribu ton. Lokasi pengolahan bijih nikel, antara lain di Kawasan Industri Morowali-Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng-Sulawesi Selatan, dan Kawasan Industri Konawe-Sulawesi Tenggara.

Seiring dengan peningkatan kapasitas smelter besi di dalam negeri, Kemenperin optimistis produksi baja mencapai 10 juta ton tahun 2025, dan stainless steel 4 juta ton pada 2019.

Derasnya investasi membuat kapasitas industri smelter terus meningkat. Pada awal tahun 2018 saja, sudah ada tambahan investasi sekitar USD3 miliar di industri smelter, baik ekspansi maupun proyek baru.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto merinci, total penanaman modal di sektor industri pengolahan dan pemurnian logam tersebut, terdiri dari investasi PT Fajar Bhakti Nusantara di Gebe Papua Barat untuk pabrik nickel pig iron senilai USD350 juta.

Ada pula, perusahaan asal Tiongkok, Virtue Dragon yang berinvestasi di Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk membangun pabrik ferronickel senilai USD2,5 miliar.

Selain itu, PT Kalimantan Surya Kencana menggelontorkan dananya untuk membangun pabrik pengolahan tembaga senilai USD135 juta. Saat ini perusahaan dalam tahap studi dan ditargetkan pembangunannya selesai pada akhir 2018.

Beberapa perusahaan juga mulai merealisasikan rencana investasi mereka, di antaranya Made By Good (MBG) Group melalui anak usahanya PT MBG Nikel Indonesia.

Perusahaan pertambangan asal Korea Selatan ini membangun pabrik smelter nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan investasi Rp76 triliun.

Rencananya, pabrik smelter nikel di atas luas lahan seluas 311 hektare ini akan selesai pada dua tahun ke depan secara bertahap dan menyerap ribuan tenaga kerja.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Priyadi Santoso memproyeksikan, prospek industri smelter pada tahun 2018 akan lebih baik sehingga mendorong minat investasi.

Kondisi ini, menurut dia, antara lain didorong oleh kenaikan harga komoditas, seperti batubara dan feronikel, serta perekonomian dunia yang mulai pulih. "Kami perkirakan

prospeknya masih bagus," tutur Priyadi.

Dia mengatakan perkembangan industri smelter di dalam negeri turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia, dimana konsumen global di kawasan Eropa diprediksi meningkatkan permintaannya.

"Negara-negara di Eropa, kecuali Inggris yang masih belum bisa ditebak, mengalami peningkatan. Ekonomi dunia juga diprediksi akan membaik. Ini sangat bagus," paparnya.

DUKUNGAN KEBIJAKAN

Agar bisa terus berkembang, industri smelter membutuhkan dukungan kebijakan, antara lain harmonisasi perizinan usaha serta pola dan tata cara pembinaan industri smelter.

Harjanto mengakui, saat ini masih ada dualisme perizinan yang membuat investor bingung. Selain izin usaha untuk kegiatan industri pengolahan dan pemurnian mineral logam berupa Izin Usaha Industri (IUI), ada pula Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Pemurnian (IUP OP Pengolahan Pemurnian).

Beberapa industri smelter diwajibkan memiliki IUP, padahal mereka hanya melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, serta tidak memiliki lahan tambang. "Mereka akhirnya terpaksa membuat IUP. Dualisme perizinan ini membingungkan investor. Makanya, kami akan berusaha mencari solusi," kata Harjanto.

Dia mengatakan, kebijakan yang mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri sangat diperlukan. Jika tidak, pelaku usaha akan lebih memilih untuk ekspor bahan baku daripada membangun fasilitas pengolahan mineral di dalam negeri.

Kemenperin telah meminta Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) untuk mendata perusahaan dan permasalahan terkait secara terperinci.

Setelah itu, Kemenperin akan membahasnya di tingkat Kemenko Perekonomian untuk mencari solusi yang tepat. **mi**

MEMAHAMI KEMBALI ESENSI SNI WAJIB MAINAN

Ketentuan mainan impor bawaan penumpang dari luar negeri sempat menjadi polemik di tengah masyarakat beberapa waktu lalu. Polemik ini lebih disebabkan oleh kesalahpahaman petugas di lapangan yang menegakkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan konsumen.

Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menyepakati ketentuan pengecualian SNI wajib terhadap mainan impor.

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat dua poin ketentuan pengecualian yang diberikan terhadap impor mainan. Pertama, impor mainan melalui barang bawaan penumpang pesawat udara dibatasi maksimal lima pieces per orang.

Kedua, impor melalui barang kiriman dibatasi maksimal tiga pieces per pengiriman untuk satu penerima. Konsumen diberikan tenggat waktu 30 hari untuk bisa melakukan impor barang mainan melalui jasa ekspedisi.

Ketentuan mengenai SNI sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian. Dalam UU itu, standarisasi industri meliputi SNI, Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara. SNI pada dasarnya berlaku secara sukarela, tetapi dapat diberlakukan secara wajib dalam rangka Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

Kementerian Perindustrian hingga saat ini telah memberlakukan sebanyak 105 SNI wajib (253 pos tarif) produk manufaktur, antara lain makanan, minuman, tekstil dan aneka, logam, kimia dasar, kimia hilir, otomotif, elektronika, termasuk mainan.

Ketentuan SNI mainan secara wajib diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan secara Wajib, sebagaimana yang telah diubah terakhir menjadi Permenperin No. 111 Tahun 2015.

Dalam Permenperin No. 111 Tahun 2015, pada pasal 3A ayat (1) diatur bahwa pemberlakuan

SNI mainan secara wajib dikecualikan bagi mainan untuk contoh uji penerbitan SPPT SNI, memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan (model skill), serta memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus.

Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono menjelaskan, dua poin yang disepakati itu merupakan penjelasan dari barang yang memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus.

“Mainan impor sesuai dengan aturan pengecualian tersebut untuk keperluan pribadi, bukan untuk diperdagangkan kembali,” jelas.

Menurut Sigit, pengecualian kewajiban SNI mainan juga tidak lagi memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Pengawasan atas ketentuan pengecualian SNI mainan dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

Hal ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Industri

Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjelasan Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan SNI mainan.

Ketentuan ini juga didasari Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, yang menjelaskan bahwa pemberlakuan SNI wajib pada prinsipnya diperuntukkan bagi barang yang diperdagangkan.

Namun, SNI dikecualikan untuk barang-barang yang tidak diperdagangkan seperti barang untuk keperluan contoh uji, penelitian, atau pameran termasuk barang pribadi penumpang.

BARANG TIDAK BERMUTU

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih menambahkan, kebijakan yang berbasis standarisasi guna mencegah peredaran barang-barang tidak bermutu di pasar domestik, terutama yang terkait dengan kesehatan,

keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan itu juga untuk mencegah masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar nasional karena dijual dengan harga rendah.

Mainan merupakan salah satu produk atau barang yang perlu dijamin kualitasnya, sebab sebagian besar penggunaannya adalah anak-anak. “Kita tidak ingin anak-anak terkena dampak negatif dari mainan yang mengandung zat kimia berbahaya bagi kesehatan,” kata Gati.

Zat-zat kimia berbahaya itu, misalnya timbal (Pb), merkuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). Penggunaan bahan berbahaya dalam produk mainan bisa menimbulkan banyak masalah dan menghambat pertumbuhan anak.

Selain itu bisa menimbulkan bahaya tersedak, terjepit,

tergores, terjatuh, terserutur bahkan bisa mencedera pendengaran dan penglihatan anak. Lebih parah lagi, bahan berbahaya pada mainan bisa menyebabkan penyakit kanker.

Dengan penerapan SNI wajib, produsen ataupun industri mainan harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sesuai dengan peraturan, SPPT-SNI merupakan persyaratan boleh tidaknya suatu produk SNI wajib diperdagangkan ke pasar.

Meski demikian, penerapan SNI wajib di lapangan perlu didukung pemahaman yang cukup dari semua pihak terkait, tidak hanya petugas pengawas lapangan tetapi juga masyarakat. Semua pihak diharapkan memahami esensi dan tujuan pemberlakuan SNI wajib, sehingga meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman penerapan di lapangan. **mi**



Fintech di Pondok Pesantren

MENUMBUHKAN SEMANGAT SANTRIPRENEUR

Financial technology (Fintech) kini bukan lagi istilah asing bagi sebagian masyarakat di Tanah Air, termasuk para santri di pondok pesantren. Teknologi keuangan mutakhir ini sudah dimanfaatkan oleh pondok pesantren melalui aplikasi mobile.

Salah satunya adalah aplikasi Fintech yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Jawa Barat. Aplikasi yang dinamakan Mobile Fintech and Commerce Nurul Iman ini mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian.

Untuk menjalankan aplikasi itu, Kemenperin menggandeng PT Data Aksara Matra sebagai penyedia aplikasi teknologi dan PT Bank Tabungan Negara Tbk Divisi Syariah selaku penyedia layanan jasa perbankan.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kemenperin Gati

Wibawaningsih mengatakan, pemerintah mendorong lingkungan pondok pesantren memanfaatkan perkembangan teknologi digital, salah satunya melalui aplikasi Fintech.

“Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat santri untuk berwirausaha atau santripreneur, terutama dalam skala industri kecil dan menengah (IKM),” kata Gati.

Dia mengatakan aplikasi Mobile Fintech and Commerce Nurul Iman memberikan kemudahan dan keamanan kepada para santri dalam bertransaksi.

Melalui aplikasi ini, para santri, wali santri, dan mitra bisnis dapat memanfaatkan beragam fitur seperti pembelian dan pembayaran produk pondok pesantren yang memudahkan pengguna dalam mentransfer uang ke akun rekening virtual pondok pesantren atau santri.

Para santri Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman juga akan diberikan Kartu Pesantren Industri dengan nama Kartu Santri Nurul Iman, yakni kartu pintar multi-fungsi. Dengan sistem ini, para santri akan dipermudah dalam bertransaksi belanja di toko ataupun



koperasi pesantren untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Tak hanya itu, Kartu Pesantren Industri bisa digunakan sebagai kartu tabungan, kartu identitas, sekaligus kartu absensi untuk santri.

“Tentunya, keamanan santri dalam bertransaksi akan terjaga dan transparan serta akan mempermudah dalam mengelola sistem pendataan database di pesantren,” kata Gati.

Dengan penggunaan aplikasi Mobile Fintech and Commerce dan Kartu Santri Nurul Iman ini, rotasi uang dan keuntungannya dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional di pondok pesantren seperti pembayaran listrik, kesehatan santri, operasional pendidikan, pengembangan industri dan wirausaha, ataupun kebutuhan lainnya.

Selain program ini, Kemenperin juga membantu pengembangan sumber daya

manusia di pondok pesantren melalui beberapa program, antara lain Business Process Outsourcing (BPO), capacity building, dan joint operation.

PROGRAM SANTRIPRENEUR

Keberhasilan pondok pesantren mengembangkan aplikasi Fintech merupakan buah dari program Santripreneur yang gencar dilakukan Kemenperin beberapa tahun terakhir.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan bahwa pondok pesantren berpotensi besar menciptakan wirausaha industri baru, khususnya yang bergelut di sektor IKM.

“Program Santripreneur ini menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan santri pondok pesantren. Oleh karena itu, kami terus memfasilitasi melalui pemberian alat dan mesin sebagai sarana para santi belajar kemandirian sebelum terjun ke masyarakat,” ujarnya.

Kemenperin memiliki dua model penumbuhan wirausaha industri baru dan pengembangan unit industri di pondok pesantren, yaitu Santri Berindustri dan Santri Berkreasi.

“Dua model ini diharapkan memberikan manfaat santri agar terus terampil berwirausaha dan mampu meningkatkan kapasitas produksi di unit industri sehingga bisa memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pondok pesantren,” terangnya.

Sebagai proyek percontohan pada 2017, Kemenperin menggelar program Santripreneur di Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Sunan Drajat, Kabupaten Lamongan dan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Program yang dijalankan, antara lain bimbingan teknis pengolahan ikan dan pembuat-an alas kaki serta pembuat-an lampu LED dan revitalisasi industri garam. 

IMPOR GARAM INDUSTRI TOPANG MANUFAKTUR

Industri nasional yang terus berkembang membutuhkan dukungan bahan baku yang berkesinambungan, baik dari dalam negeri maupun impor. Pemerintah berkewajiban memastikan bahan baku tersebut mencukupi kebutuhan industri.

Kebijakan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan bahan baku industri juga sejalan dengan regulasi, seperti Undang-Undang Perindustrian, UU Penanaman Modal, UU Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Salah satu bahan baku yang banyak dibutuhkan industri dan sebagian masih diimpor adalah garam. Impor garam bukan hal yang baru dan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Namun, impor bahan baku itu terutama ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan industri, sedangkan garam untuk konsumsi masih dapat dipenuhi oleh industri garam di dalam negeri.

Impor garam industri merupakan keniscayaan sebab persyaratan NaCl minimal kualitas garam untuk industri kimia adalah 97 persen, sedangkan garam konsumsi hanya sekitar 94 persen.

Garam untuk industri harus memenuhi persyaratan kualitas tersebut. Jaminan pasokan bahan baku secara berkesinambungan, dapat menunjang proses produksi, stok dan perluasan pabrik atau pengembangan investasi sektor industri.

PROFIL INDUSTRI GARAM NASIONAL



On-Farm

Lahan garam tersedia	Produktivitas
28.000 Ha	70 ton/Ha/tahun
Tenaga kerja	Kontribusi ke PDB
20.000 orang	Rp72 miliar

Off-Farm

Industri pengolahan garam rakyat atau garam konsumsi, industri pengolahan garam untuk industri, dan industri pengolahan garam untuk farmasi.

Pabrik pengolah garam untuk industri farmasi

Industri Garam Konsumsi

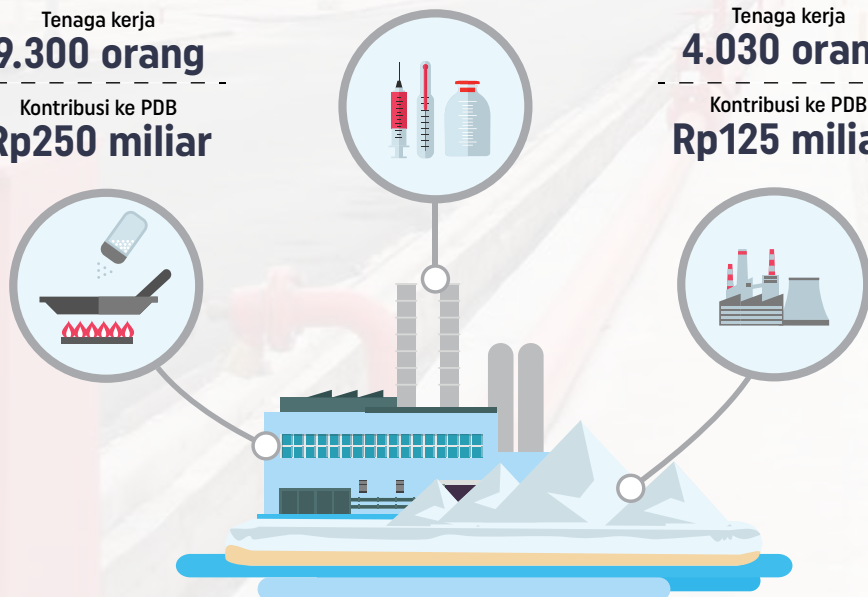
Jumlah perusahaan
10 skala besar
500 IKM
Kapasitas produksi
2,5 juta ton
Tenaga kerja
9.300 orang
Kontribusi ke PDB
Rp250 miliar

Perusahaan PT Kimia Farma

Kapasitas produksi
2.000 ton
Tenaga kerja
50 orang
Kontribusi ke PDB
Rp18 miliar

Pabrik pengolahan garam industri

Jumlah perusahaan
8 perusahaan
Kapasitas produksi
1,4 juta ton
Tenaga kerja
4.030 orang
Kontribusi ke PDB
Rp125 miliar



Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan garam industri pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian telah mengajukan rencana impor bahan baku itu sekitar 3,7 juta ton.

Kebutuhan itu akan disalurkan kepada industri Chlor Alkali Plant (CAP), untuk memenuhi permintaan industri kertas dan petrokimia sebanyak 2.488.500 ton. Selain itu, kepada industri farmasi dan kosmetik 6.846 ton serta industri aneka pangan 535.000 ton.

Sisanya, kebutuhan bahan baku garam sebanyak 740.000 ton untuk sejumlah industri, seperti industri pengasinan ikan, industri penyamakan kulit, industri pakan ternak, industri tekstil dan resin, industri pengeboran minyak, serta industri sabun dan detergen.

Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, garam untuk industri aneka pangan diimpor dalam bentuk kristal yang kasar (bahan baku) dan akan diolah oleh industri pengolahan garam menjadi garam untuk kebutuhan industri.

Dia mengungkapkan, beberapa sektor industri CAP mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti industri petrokimia, makanan dan minuman, serta farmasi dan kosmetik.

Menurut dia, pertumbuhan industri tersebut perlu dijaga, apalagi manufaktur menjadi sektor andalan karena berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, lanjut Sigit, pemerintah berupaya memberikan kemudahan, termasuk izin impor bahan baku garam untuk kebutuhan sejumlah manufaktur.

Pemenuhan bahan baku untuk industri akan membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional. Pasalnya, impor bahan baku garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp1,8 triliun itu akan diolah menjadi berbagai produk dengan nilai tambah besar.

Nilai tambah itu, antara lain melalui kontribusi PDB sebesar

“Pertumbuhan industri tersebut perlu dijaga, apalagi manufaktur menjadi sektor andalan karena berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.”

Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono

Rp1.100 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 4 juta orang, dan perolehan devisa dari ekspor mencapai USD30 miliar.

DORONG INVESTASI

Kemudahan impor bahan baku tersebut diharapkan mendorong investor untuk membangun industri di dalam negeri. Khusus di industri garam, salah satu yang dibutuhkan investor tentunya adalah ketersediaan lahan.

“Industri harus membebaskan lahan. Kalau lahan tidak terbebaskan, industrinya jadi bisa dibangun. Jadi, bergantung pada pendekatan, kalau serius mau investasi, pasti ada jalannya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan data Kemenperin, struktur industri garam nasional terdiri dari on-farm atau lahan garam, off-farm atau industri pengolahan garam, serta sektor-sektor industri pengguna garam.

Saat ini, lahan garam yang tersedia seluas 28 ribu hektare dengan produktivitas 70 ton per hektare per tahun, menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu

orang dan menyumbang kepada PDB sebesar Rp72 miliar.

Sementara itu, sektor off-farm meliputi industri pengolahan garam rakyat atau garam konsumsi, industri pengolahan garam untuk industri, dan industri pengolahan garam untuk farmasi.

Untuk industri garam konsumsi, terdapat 10 industri besar dan 500 unit skala industri kecil dan menengah (IKM). Sektor ini secara total menyerap tenaga kerja 9.300 orang dengan jumlah kapasitas produksi 2,5 juta ton dan kontribusi terhadap PDB Rp250 miliar.

Untuk pabrik pengolahan garam industri, terdapat delapan perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 4.030 orang, kapasitas produksi 1,4 juta ton, dan menyumbang untuk PDB sebesar Rp125 miliar.

Adapun pabrik pengolahan garam untuk industri farmasi, saat ini dimiliki oleh PT Kimia Farma dengan jumlah 50 tenaga kerja, kapasitas produksi 2.000 ton, dan kontribusi ke PDB Rp18 miliar.

Beberapa industri pengguna, antara lain industri CAP, yang terdiri dari 13 perusahaan dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 17.000 orang, nilai ekspor mencapai USD5,5 miliar, dan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp65,3 triliun.

Industri Aneka Pangan, terdapat 410 perusahaan dengan total tenaga kerja 877.424 orang, nilai ekspor mencapai USD8,7 miliar, dan sumbangsih untuk PDB sebesar Rp586,5 triliun.

Industri Farmasi saat ini meliputi 206 perusahaan dengan jumlah 50 ribu tenaga kerja, nilai ekspor USD0,64 miliar, dan kontribusi ke PDB sebesar Rp54,4 triliun.

Selain itu, industri tekstil, terdapat 1.798 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 2,5 juta orang, nilai ekspor mencapai USD4,6 miliar, dan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp34 triliun. 

MEMACU PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Kementerian Perindustrian menargetkan nilai investasi yang ditanamkan di 13 kawasan industri pada tahun 2018 mencapai Rp250,7 triliun. Target ini bukan isapan jempol sebab pengembangan kawasan industri beserta fasilitasnya terus digenjot.

Tahun ini, 10 kawasan industri baru sudah beroperasi, lebih cepat dari target program Nawacita yakni pada 2019. Bahkan, tiga tambahan kawasan industri segera selesai pembangunannya pada tahun ini juga.

Tiga kawasan industri baru yang semuanya berlokasi di luar Pulau Jawa itu, yakni Kawasan Industri Lhokseumawe di Aceh, Kawasan Industri Wilmar di Serang, dan Kawasan Industri Tanjung Buton di Riau. Artinya, hingga akhir tahun ini akan ada 13 kawasan industri.

Tidak berhenti di situ, Kemenperin akan menambah lima kawasan industri lagi yang bakal dibangun pada 2019. Dengan demikian, tahun depan bakal ada 18 kawasan industri baru yang siap beroperasi.

Seiring dengan pembangunan fisik, Kemenperin juga gencar menarik investor untuk menanamkan modalnya di kawasan industri tersebut. Sebagai pemanis, investor ditawarkan sejumlah kemudahan investasi.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, kemudahan berinvestasi di kawasan industri antara lain melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal serta pembentukan satgas untuk penyediaan gas, listrik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain.

Dia mengatakan pengembangan kawasan industri, terutama di luar Jawa, diperlukan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia sentris.

“Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Apalagi, aktivitas industri membawa efek positif yang luas, seperti peningkatan pada nilai tambah bahan baku, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa.

Untuk memudahkan investor mengembangkan bisnisnya, Kemenperin memfasilitasi pembangunan kawasan industri

terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang.

SIAPKAN ANGGARAN

Kemenperin juga telah menyiapkan anggaran Rp140,75 miliar pada 2018 untuk menunjang pengembangan tiga kawasan industri di luar Jawa, yaitu Sei Mangkei Sumatera Utara, Morowali Sulawesi Tengah, dan Bantaeng Sulawesi Selatan.

Pengembangan yang akan dilakukan, antara lain perluasan lahan dan peningkatan keperluan operasional kawasan industri. Selain itu, pembangunan infrastruktur, menyiapkan ketersediaan SDM, dan peningkatan investasi.

Sei Mangkei ditargetkan mampu menarik investasi Rp129 triliun di atas lahan seluas 1.933 hektare dan diharapkan menyerap 83.300 tenaga kerja hingga tahun 2031. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini difokuskan untuk industri hilir kelapa sawit, karet, dan aneka industri.

13 KAWASAN INDUSTRI DI INDONESIA



Sumber: Kemenperin, Februari 2018

40

Dari luas area kawasan tersebut, pembagiannya untuk zona industri sebesar 70 persen, zona logistik 15 persen, dan sisanya untuk sektor pariwisata. Saat ini sudah ada satu perusahaan yang beroperasi, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia dengan nilai investasi Rp3,35 triliun.

Tiga perusahaan lain segera mengisi KEK tersebut, yakni PT Industri Nabati Lestari dengan investasi Rp 1 triliun yang ditargetkan beroperasi April 2018.

Selain itu, PT Alternative Protein Indonesia yang akan membangun insect bio reactor atau pengolahan ekstraksi protein serangga (IBR) untuk makanan ternak, dengan investasi Rp5,7 triliun.

Perusahaan lain yakni PT Pertamina (Persero) yang akan membangun pembangkit tenaga listrik biogas berkapasitas 1,6 megawatt dengan investasi Rp53 miliar.

Untuk memudahkan investor di kawasan itu, Kemenperin dan PTPN III akan menyiapkan infrastruktur, seperti jalan poros, dryport, dan jalur kereta api sepanjang 3,9 km.

Adapun di KI Morowali, total realisasi investasi hingga saat ini mencapai USD6 miliar dan menyerap tenaga kerja lebih dari 10 ribu orang. Kawasan di atas lahan seluas 2.300 hektare ini sebagian besar diisi oleh smelter berbasis nikel.

KI Morowali merupakan salah satu percepatan pengembangan proyek industri logam di dalam negeri, seperti industri berbasis nikel dan baja tahan karat atau stainless steel.

Kawasan ini diharapkan menghasilkan 4 juta ton baja stainless steel dan pabrik baja karbon berkapasitas 3,5 juta ton per tahun.

Untuk mengantisipasi pertumbuhannya yang pesat di masa mendatang, Kemenperin memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Logam Morowali sebagai pusat inovasi teknologi dan pengembangan produk berbasis nikel.

Sekolah tinggi vokasi ini merupakan salah satu best practice dalam pelaksanaan pendidikan yang mengusung konsep link and match dengan dunia industri.

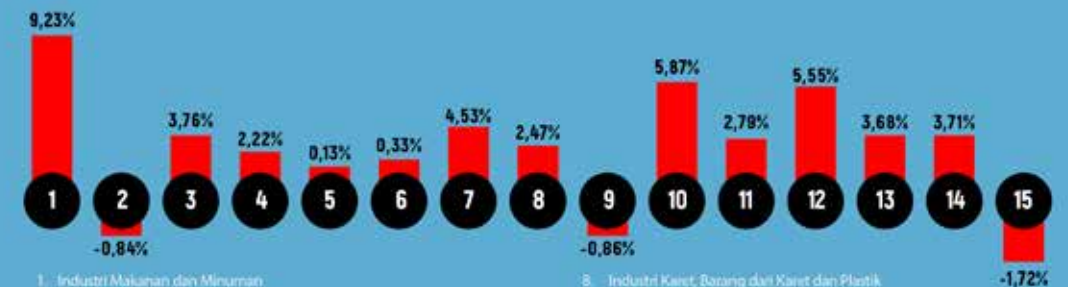
Politeknik seluas 30 hektare ini dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan penelitian lengkap, misalnya ruang kelas, laboratorium, bengkel kerja, pusat inovasi, gedung direktorat, dan perpustakaan.

Sementara itu, KI Bantaeng yang berdiri di atas lahan seluas 3.000 hektare ditargetkan menyedot investasi USD5 miliar dari Harbour Group sebagai investor.

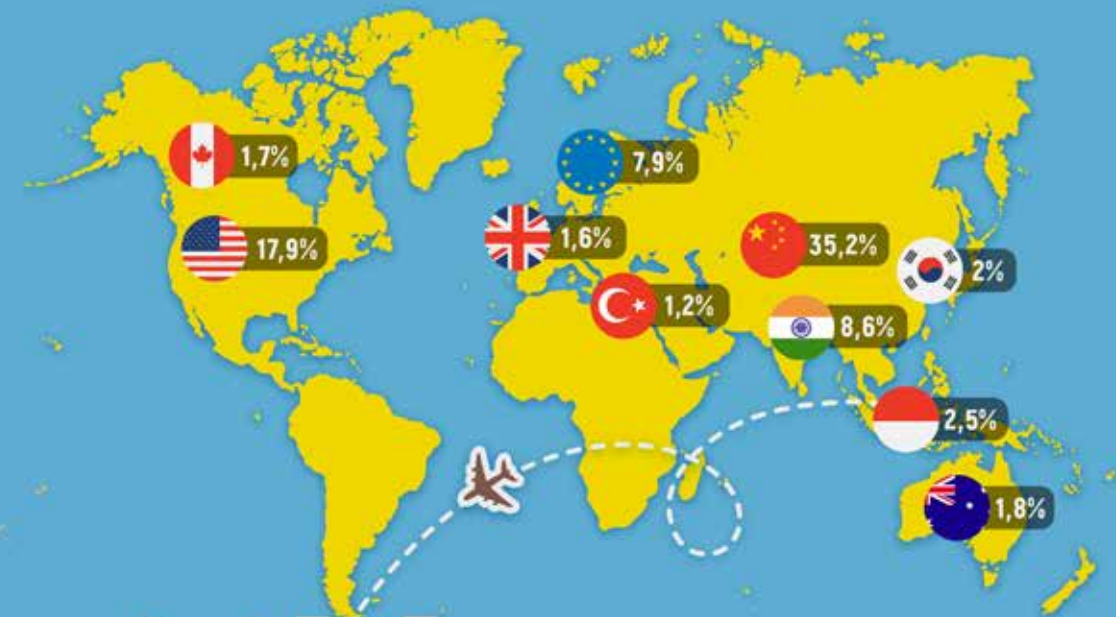
Untuk mendukung industri logam di kawasan ini, Kemenperin membangun Akademi Komunitas Industri Manufaktur. Kampus yang berdiri di atas lahan 2 hektare ini membuka tiga jurusan, yakni teknik elektro, teknik mesin dan kimia analisis.

Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari gedung akademik, ruang kelas, ruang praktik, peralatan industri, hingga mesin-mesin untuk pembelajaran. [mi](#)

PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS 2017



KONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL 2017



Ket: ✈ Ekspor Manufaktur (USD miliar)

PERAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS TERHADAP EKSPOR 2013-2017



41

MENJARING INVESTASI INGGRIS DI SEKTOR INDUSTRI

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Inggris sudah berjalan sejak lama dan memiliki landasan cukup kuat untuk terus ditingkatkan.

Inggris merupakan mitra dagang ke-4 terbesar bagi Indonesia dari negara-negara Eropa. Pada 2016, nilai perdagangan dengan negara Ratu Elizabeth ini mencapai USD 2,48 miliar. Investasi dari negara itu juga tidak sedikit yakni USD 306 juta, atau investor asal Eropa terbesar kedua di Indonesia.

Selama ini, Indonesia mengandalkan ekspor alas kaki, mesin elektrik dan perlengkapannya, serta barang dari kayu ke pasar Inggris. Adapun, impor dari Inggris didominasi oleh produk permesinan serta peralatan medis.

Dalam pertemuan dengan British Chamber of Commerce (BritCham) di Jakarta pada 13 Februari lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha Inggris untuk menggali peluang investasi yang masih terbuka luas di Indonesia, terutama terutama di sektor industri.

Dia berharap, melalui BritCham, kerja sama perdagangan Indonesia dan Inggris semakin meningkat. "Targetnya kita ekspor yang tidak diproduksi di Inggris, dan yang mereka ingin masukkan ke Indonesia juga compatible," kata Airlangga.

Dalam pertemuan itu, pelaku usaha Inggris mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang berupaya menciptakan iklim investasi kondusif untuk pengembangan sektor industri, termasuk program pendidikan vokasi yang dijalankan Kemenperin.

Mereka juga memberikan masukan terkait dengan industry value chain agar industri nasional semakin kompetitif di tingkat global. Salah satu pertanyaan mereka adalah keterkaitan antara sektor industri dan energi di Indonesia.

"Hal ini menjadi salah satu tantangan yang ada, pertumbuhan sektor industri harus bisa compatible dengan sektor energi," kata Menperin.

Secara khusus, BritCham mengapresiasi kebijakan hilirisasi yang dijalankan Kemenperin di sektor industri mineral untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia.

Menperin mengungkapkan industri logam di Indonesia telah memasuki era baru karena mampu memproduksi aluminium dari bauksit serta carbon steel dan stainless steel.

Pada akhir 2018, industri baja Indonesia akan memproduksi crude stainless steel hingga 4 juta ton. Jumlah tersebut menyamai kapasitas produksi aluminium di seluruh Eropa.

INVESTASI DI KAWASAN INDUSTRI

Dalam kesempatan itu, Menperin menawarkan kepada para anggota BritCham agar melakukan ekspansi atau membangun pabrik baru di beberapa kawasan industri yang telah dibangun, terutama di luar Pulau Jawa.

Kawasan industri itu antara lain di Sei Mangkei, Sumatera Utara, yang berbasis pada pengembangan industri pengolahan kelapa sawit. Selain itu, klaster industri logam di Sulawesi yakni kawasan industri Bantaeng dan Konawe. Ada pula klaster industri berbasis petrokimia di Bintuni dan Masela.

Menperin menyampaikan, pertumbuhan pasar domestik menunjukkan potensi investasi masih besar. Apalagi, tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif dari sisi upah dan kualitas, selain adanya supply base untuk industri perakitan.

Untuk merangsang masuknya investasi, Kemenperin sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPH) badan atau tax allowance.

Ada tiga poin utama terkait dalam usulan revisi aturan tersebut. Pertama, pemberian tax allowance bagi perusahaan eksisting yang melakukan ekspansi usaha. Insentif ini mempertimbangkan serapan tenaga kerja atau untuk industri padat karya.

Kedua, fasilitas tax allowance sebesar 200 persen bagi industri yang mengembangkan pendidikan vokasi. Poin ketiga, yakni tax allowance sebesar 300 persen bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan atau research and development (R&D). **mi**



KOLABORASI ASEAN HADAPI INDUSTRY 4.0

Negara-negara anggota ASEAN sepakat menjalin kerja sama ekonomi yang komprehensif menghadapi Industry 4.0. Kesepakatan ini dilandasi kepentingan yang sama untuk memperkuat sektor-sektor potensial di tengah gelombang revolusi industri keempat tersebut.

Kesepakatan kerja sama dicapai dalam pertemuan multilateral Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan delegasi negara-negara ASEAN di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2018 di Davos, Swiss, 27 Januari lalu.

Di era Industry 4.0, sektor industri mengimplementasikan otomasi dalam proses produksi, yaitu melalui pemanfaatan tenaga robotik yang terhubung dengan internet dalam pengoperasiannya.

Menperin mengungkapkan, ada empat sektor industri yang akan dipacu bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selain telah menerapkan Industry 4.0, kelompok industri ini menjadi kekuatan unggul di tingkat regional. Sektor itu, yakni industri otomotif, elektronika, makanan dan minuman, serta textile clothes footwear (TCF).

Menurut Airlangga, daya saing industri Indonesia cukup kompetitif di sektor-sektor tersebut. Misalnya sektor otomotif, selain punya pasar domestik yang besar, Indonesia juga menjadi basis produksi dari beberapa perusahaan otomotif dunia.

Pemerintah menargetkan produksi otomotif bisa menembus 2,5 juta unit pada tahun 2020 agar bisa bersaing di kancah internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri alat angkutan mencapai 5,63 persen atau di atas

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen pada kuartal ketiga 2017.

Sektor ini juga menjadi salah satu kontributor terbesar pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan nonmigas yang mencapai 10,11 persen.

Demikian pula industri elektronika dalam negeri, yang menunjukkan kinerja positif. Hingga tahun 2016, menurut catatan Kemenperin, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS), 42 merek dan 37 pemilik merek baik global dan nasional, dengan total nilai investasi Rp7 triliun serta menyerap 13 ribu orang tenaga kerja.

Kemenperin memberikan dukungan penuh kepada sektor ini, antara lain dengan memfasilitasi pembangunan Techno Park di sejumlah kota, seperti Bandung, TohpaTI Center Denpasar, Inkubator Bisnis IKITAS Semarang, Makassar Techno Park, dan Pusat Desain Ponsel di Batam.

Implementasi Industry 4.0 juga akan digencarkan di industri makanan dan minuman (mamin), salah satu sektor strategis dan berpotensi terus tumbuh pesat. Jumlahnya pelaku industri ini di Indonesia sangat banyak, mulai dari tingkat kabupaten hingga yang sudah go international.

Data BPS menyebutkan, pertumbuhan industri makanan minuman mencapai 9,46 persen



pada kuartal kuartal 2017 atau naik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 7,19 persen.

Sektor ini mampu menyumbangkan PDB industri nonmigas pada periode tersebut sebesar 34,95 persen, tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, serapan tenaga kerja industri ini mencapai 3,3 juta orang atau 21,34 persen dari total serapan tenaga kerja nasional. Angka ini terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Tidak kalah dengan sektor lain, kelompok industri textile clothes footwear (TCF) atau pakaian, tekstil, dan sepatu, juga sudah menguasai pasar global. Khusus untuk industri shoes and apparel sport, Indonesia bahkan sudah melampaui Tiongkok.

MOMENTUM MEA

Melalui kerja sama tersebut, Kemenperin akan mendorong agar industri-industri andalan Indonesia

itu bisa terintegrasi ke dalam rantai pasok di tingkat ASEAN.

Penguatan kerja sama ekonomi, khususnya di sektor industri, semakin diperkuat seiring dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai sejak 2015.

Momentum ini yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk saling melengkapi satu sama lain. Apalagi, pertumbuhan ekonomi ASEAN cukup tinggi dan stabil dibandingkan dengan kawasan lain.

"Kami meyakini Asean akan menjadi kawasan yang mampu memimpin sebagai future of production, dengan basis internet of everything sebagai infrastruktur utamanya," ungkap Airlangga.

Menurut dia, era Industry 4.0 tidak bisa dihindari karena sudah berlangsung dan akan terus berkembang. Revolusi industri

keempat ini mengintegrasikan setiap sektor produksi di industri secara online.

Pemerintah melalui Kemenperin juga telah menyusun strategi dan perangkat kebijakan guna mempersiapkan industri dalam negeri menghadapi era ekonomi berbasis digital ini, antara lain membuat roadmap Industry 4.0.

Kebijakan Kemenperin bersifat holistik, tidak hanya melibatkan industri skala besar, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM) didorong menangkap peluang Industry 4.0 dengan memanfaatkan teknologi manufaktur mutakhir.

Kebijakan untuk IKM, di antaranya program e-Smart IKM yang diluncurkan Kemenperin pada awal tahun 2017 dan bertujuan meningkatkan akses pasar melalui internet marketing.

Dalam program ini, Kemenperin menggandeng

beberapa marketplace dalam negeri, seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Bukalapak dan Blanja. IKM yang terlibat bisa memanfaatkan platform e-commerce tersebut untuk memasarkan produk mereka melalui internet.

Sepanjang tahun 2017, Kemenperin mencatat lebih dari 1730 pelaku usaha telah bergabung dalam e-Smart IKM yang berasal dari 23 provinsi. Pada 2019, jumlah pelaku IKM yang terlibat ditargetkan mencapai 10 ribu.

Melalui program ini pula, pelaku IKM didorong untuk terus berinovasi dengan mengembangkan desain, meningkatkan kualitas produk, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan. **mi**

UNI EMIRAT ARAB INCAR PROYEK LISTRIK DAN ALAT KESEHATAN

Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat menarik perhatian investor dari Uni Emirat Arab. Beberapa investor kakap dari kawasan Timur Tengah itu bahkan telah menyatakan minat berinvestasi di Indonesia, antara lain Emaar, Dubai World, Drydock, Limitles, Etisalat, Mudabala, IPIC, dan Al Dhahra.

Minat itu juga diutarakan delegasi Investor Swasta Persatuan Emirat Arab yang dipimpin oleh CEO Tashyeed Group Zayed Bin Owaidah Al Qubaisy saat bertemu dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta pada 6 Februari lalu.

Uni Emirat Arab merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Investor dari kelompok negara kerajaan itu telah menanamkan modal ke Indonesia hingga USD55 juta dengan 80

proyek pada tahun 2016, melonjak dari tahun sebelumnya sebesar USD 19,25 juta.

Menurut Menperin, Indonesia dan Uni Emirat Arab berpotensi meningkatkan kerja sama di berbagai sektor industri. Peluang kolaborasi yang akan dijajaki kedua belah pihak, antara lain investasi di industri pembangkit listrik, alat kesehatan, energi alternatif dan migas, serta pengolahan air.

"Indonesia memandang Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis, khususnya Dubai sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, untuk peningkatan ekspor produk industri kita ke berbagai negara," kata Airlangga.

Potensi investasi industri pembangkit listrik di Indonesia memang sangat besar, sejalan dengan pembangunan proyek ketenagalistrikan 35.000 MW. Megaprojek ini terdiri dari 291 unit pembangkit listrik, 735 jalur



jaringan transmisi, dan 1.273 unit gardu induk dengan total investasi Rp1.189 triliun.

Untuk mendukung program kelistrikan itu, pemerintah juga memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat.

Sektor lain yang potensial diminati investor Uni Emirat Arab adalah industri alat kesehatan. Di sektor ini, pemerintah pun sedang gencar mendorong penggunaan teknologi terkini secara terintegrasi, termasuk komponen, bahan baku dan bahan penolong.

Kemenperin berharap industri alat kesehatan ini didukung center of excellent, yang mencakup kegiatan litbang dalam mendukung produksi alat kesehatan dasar massal untuk keperluan dalam negeri.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pada teknik desain produk alat kesehatan. Kapasitas industri kecil dan menengah (IKM)

dalam menghasilkan komponen alat kesehatan juga ditingkatkan melalui bantuan teknis dan peralatan uji.

SAAT TEPAT

Menperin menegaskan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi investor Uni Emirat Arab untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap kemudahan berusaha.

Serangkaian deregulasi dan paket kebijakan ekonomi telah digulirkan, seperti kemudahan layanan investasi tiga jam, fasilitas di kawasan logistik berikat, dan insentif di kawasan industri sesuai zona.

Salah satu program pemerintah yang menarik adalah pengembangan kompetensi SDM industri melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Melalui program ini, investor yang akan mengembangkan pendidikan vokasi dan pusat inovasi bisa menikmati insentif fiskal

dari pemerintah berupa pengurangan terhadap pajak penghasilan (PPh).

Skema insentif yang sukses diterapkan Thailand ini telah diusulkan Kemenperin kepada Kementerian Keuangan untuk segera diimplementasikan.

Dalam skema tersebut, perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah kejuruan serta memberikan pemagangan dan penyediaan alat industri, akan diberikan tax allowance sebesar 200 persen.

Bagi perusahaan yang membangun fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D) di dalam negeri, tax allowance yang ditawarkan lebih besar lagi, yakni sebesar 300 persen.

Insentif fiskal ini diharapkan semakin pemberdayaan SDM lokal dan memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, selain mendorong alih teknologi ke industri nasional. **mi**



Hingga Maret 2018, Kemenperin sudah menggelar lima tahap program pendidikan vokasi industri di 10 provinsi. Jumlah peserta dari kalangan industri mencapai 569 perusahaan, sementara dari dunia pendidikan sebanyak 1.537 SMK.

Hingga tahun 2019, Kemenperin menargetkan 1.795 SMK yang akan dibina dan dikerjasamakan dengan industri.

Tingginya minat kalangan industri tidak terlepas dari kebutuhan riil pasar kerja saat ini terhadap sumber daya manusia terampil dan siap pakai, terutama untuk bidang pekerjaan yang semakin spesifik.

Dalam program pendidikan vokasi, keikutsertaan industri sekaligus akan mempermudah mereka mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektornya.

Di samping pendidikan vokasi industri, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi penempatan kerja) serta diklat peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja industri untuk peningkatan kualitas dan daya saing serta kesejahteraan tenaga kerja.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, program pendidikan vokasi merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Melalui program ini, seluruh SMK di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

Program vokasi industri juga sebagai wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas SDM Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0.

“Pembangunan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,” kata Menperin saat peluncuran Program Pendidikan Vokasi antara

“Pembangunan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktivitas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,”

Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto

Industri dan SMK untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, 5 Maret silam.

Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang meresmikan peluncuran program tersebut.

Program tahap kelima ini diikuti 143 perusahaan industri dan 292 SMK di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Pada kesempatan itu, ditandatangani 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK.

BANTUAN PERALATAN

Seperti pada tahap-tahap sebelumnya, beberapa perusahaan industri yang mengikuti tahap kelima ini juga memberikan bantuan berupa peralatan praktik kepada sejumlah SMK.

Kali ini, hibah peralatan diberikan oleh 35 perusahaan industri kepada 128 SMK. Salah satu perusahaan, yakni PT Chandra Asri Petrochemical, memberikan hibah berupa lahan kepada Pusdiklat Kemenperin untuk pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon.

Setelah wilayah DKI Jakarta dan Banten, Kemenperin berencana melanjutkan program vokasi

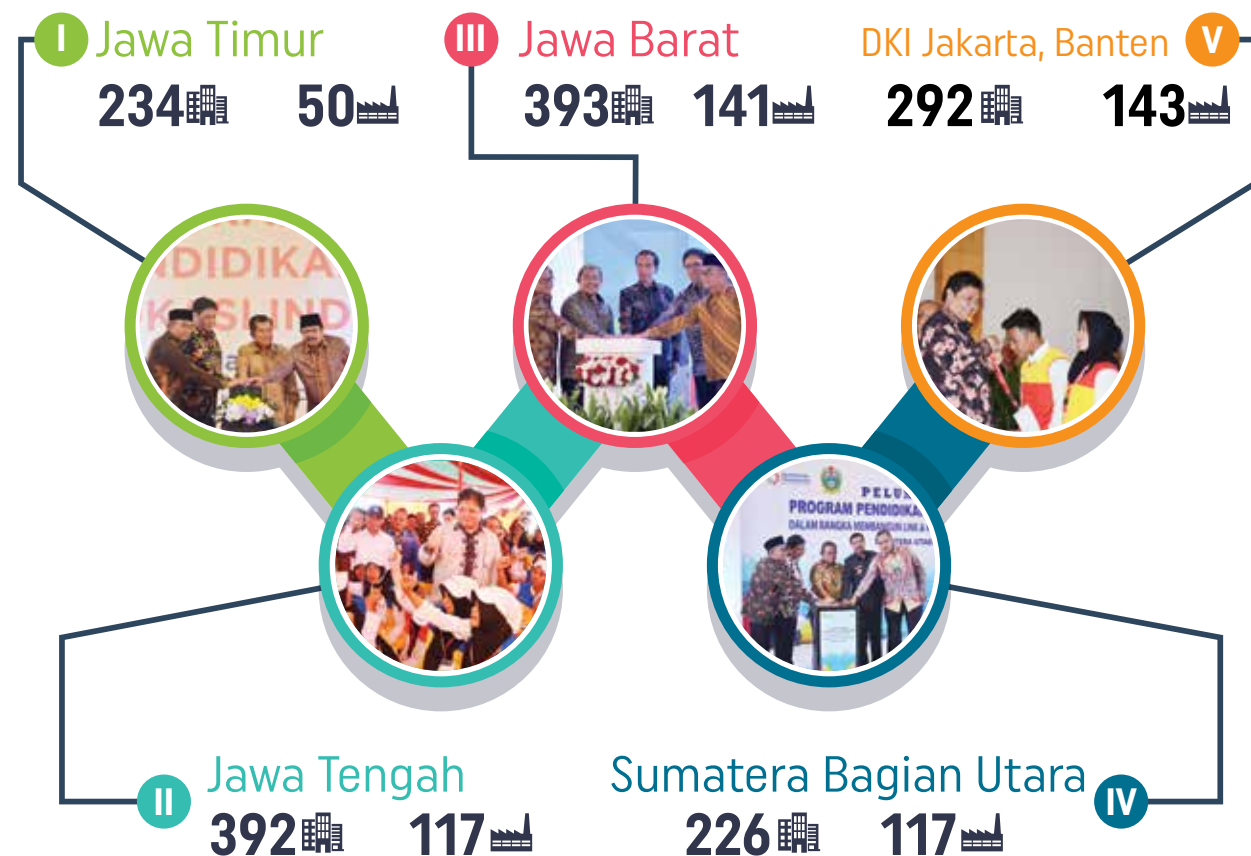
Program Vokasi Industri Makin Diminati

Program pendidikan vokasi yang digulirkan Kementerian Perindustrian sejak tahun 2017 semakin diminati oleh kalangan industri. Ini tercermin dari tingginya keikutsertaan perusahaan dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam program itu di berbagai daerah.



TAHAPAN PELUNCURAN VOKASI INDUSTRI

SMK Perusahaan



industri secara bertahap untuk wilayah Sumatera bagian Selatan (Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), serta Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, Menperin menyampaikan sejumlah progres yang dicapai sebagai tindak lanjut peluncuran program pendidikan vokasi industri selama ini.

Progres tersebut, antara lain penyelarasan kurikulum bersama SMK dengan industri untuk 34 program keahlian yang terkait industri. Kurikulum baru memasukkan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri ke dalam mata pelajaran di SMK.

Selain itu, penyusunan modul untuk materi pembelajaran tambahan sesuai kebutuhan industri sebanyak 34 program keahlian

dengan melibatkan praktisi industri dan SMK.

Hasil penyelarasan kurikulum dan modul untuk 34 program keahlian tersebut telah disampaikan Kemenperin kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait, dan SMK yang bersangkutan.

Kemenperin juga memberikan bantuan peralatan praktikum minimum untuk 74 SMK di Jawa Tengah dan Jawa Timur, rata-rata senilai Rp500 juta per SMK pada tahun 2017.

Sejalan dengan itu, kompetensi guru terus ditingkatkan. Untuk itu, Kemenperin bekerja sama dengan Institute of Technical Education (ITE) Singapura dan Taiwan untuk melatih 200 Kepala SMK dan guru bidang studi Produktif di bidang Teknik Permesinan, Teknik

Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik, Otomatisasi Industri dan Machine Tools.

Kompetensi guru juga diperkuat melalui pelatihan teknis untuk 700 guru produktif, magang 1.000 guru di industri, dan penyediaan silver expert.

Kemenperin memfasilitas siswa dan guru untuk praktik kerja industri bagi siswa dan magang guru di industri. Perusahaan akan menyediakan workshop, laboratorium, training center atau teaching factory, serta instruktur sebagai tenaga pembimbing.

Perusahaan industri yang terlibat dalam pembinaan dan pendidikan vokasi ini akan diberikan insentif. Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk pemberian insentif tersebut. **mi**

MANUFACTURING VALUE ADDED

[M V A]

Industri mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa dari ekspor, serta menjadi salah satu sumber penerimaan negara dari pajak dan cukai.



NILAI TAMBAH MANUFAKTUR

Industri pengolahan atau manufaktur menjadi kunci penting guna memacu perekonomian karena lebih produktif dan memberikan efek berantai yang luas.

Indonesia memiliki pertumbuhan nilai tambah manufaktur tertinggi di antara negara-negara ASEAN



Devisa Negara

Indonesia menggunakan International Standard Industrial Classification sebagai batas manufaktur



"MVA adalah perkiraan total net-output dari semua unit aktivitas manufaktur penduduk yang diperoleh dengan menambahkan output dan mengurangi input antara"
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

PROSES NILAI TAMBAH MANUFAKTUR



KONSISTENSI MENJAGA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

52

Kementerian Perindustrian kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik pada 2017. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) ini menempatkan Kemenperin di peringkat kedua dari 10 besar kategori kementerian yang dinilai terbaik.

Prestasi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di peringkat ketiga, sekaligus menunjukkan konsistensi Kemenperin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, kami berkomitmen semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan dan pemberian informasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Kepala Biro Humas Kemenperin Setia Utama di Istana Wapres Jakarta pada 21 Desember lalu.

Selain Menperin, acara tersebut disaksikan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua KIP Tulus Subardjono.

Penghargaan ini melengkapi prestasi Kemenperin di pengujung tahun 2017. Pada 12 Desember, empat unit kerja Kemenperin juga mendapat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tiga besar penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017 kategori Badan Publik Kementerian, yaitu Kementerian

Keuangan dengan nilai 95,39, diikuti Kemenperin meraih nilai 95,37 dan Kementerian Perhubungan mendapat nilai 93,28.

Penghargaan yang sudah menjadi langganan bagi Kemenperin dalam beberapa tahun terakhir merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua jajaran di lingkungan Kemenperin dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kami fokus membangun inovasi dan sinergi pelayanan

informasi publik di lingkungan Kemenperin,” kata Menperin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Kepala Biro Humas merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat.

DESK PELAYANAN

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Setia Utama mengatakan pihaknya telah menyediakan Desk Pelayanan Informasi Publik sejak Oktober 2011 di lantai dasar gedung Kementerian.

Kemenperin juga mengembangkan sistem pelayanan informasi publik melalui website www.kemenperin.go.id yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh KIP untuk mengevaluasi keterbukaan informasi di badan publik. Penilaian dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 34 badan publik tingkat kementerian/lembaga negara.

KPI kemudian akan menilai badan publik dalam menjalankan

kewajiban untuk mengumumkan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik serta melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai UU KIP.

Pemeringkatan menggunakan metode Self Assessment Questionnaire (SAQ) kepada seluruh badan publik, dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim KIP.

Pada tahap akhir, tim KIP melakukan kunjungan ke badan publik untuk mengukur 5 Ko (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, dan Konsisten) terhadap Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka menyusun peringkat 10 besar. 



53

| DESTINASI

Labuan Bajo



PESONA BAHARI
DI TIMUR INDONESIA

Oleh: Arie Arnanda

Siapa yang tidak mengenal Labuan Bajo? Wilayah yang merupakan ibukota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini dikenal dengan Taman Nasional Komodo nya.



Tidak hanya itu, Labuan Bajo juga menawarkan berbagai spot wisata dengan sejuta keindahan alam yang mempesona.

Buat anda yang hobi traveling, Labuan Bajo menjadi destinasi wajib, tidak hanya turis lokal yang menjamah keindahan pariwisatanya. Bahkan, banyak turis mancanegara berbondong-bondong ingin berkunjung ke lokasi yang dijuluki “The Gate to Komodo”.

Singkat kata, kami melakukan travelling ke wilayah ujung barat Flores tersebut, perjalanan kami menuju Labuan Bajo ditempuh melalui pesawat terbang, jarak perjalanan udara memakan waktu 2 jam lebih, begitu kami akan mendarat, kami disuguhi pemandangan pulau-pulau dan kapal kapal yang berbagai macam ukuran bersandar di pelabuhan Labuan Bajo yang letaknya tidak terlalu jauh dari Bandara Komodo.

Dalam perjalanan menuju hotel, kami memutuskan untuk bermalam di Labuan Bajo Hotel untuk beristirahat, salah satu hotel bintang tiga di Labuan Bajo yang merupakan tempat penginapan cukup terjangkau bagi para travellers yang ingin berwisata di sana.

Di hari kedua, kami sudah membuat rencana untuk mengeksplorasi keindahan Labuan Bajo, destinasi pertama yang akan kami kunjungi adalah Pulau Padar, Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga yang termasuk dalam bagian kawasan Taman Nasional Komodo.

Letak Pulau Padar berada di antara pulau Rinca dan Pulau Komodo. Dan posisi pulau ini lebih dekat ke pulau Rinca dibandingkan dengan Pulau Komodo yang dipisahkan oleh Selat Lintah.

Setelah itu, kami langsung bergegas menuju pelabuhan Labuan Bajo untuk menaiki kapal yang kami sewa sebagai transportasi yang bisa dijangkau menuju Pulau Padar, perjalanan dari pelabuhan Labuan Bajo menuju Pulau Padar dapat ditempuh kurang lebih 3 jam perjalanan, sangat disarankan untuk berangkat dari subuh mengingat kondisi cuaca dan gelombang laut cukup tinggi.



Pulau Padar menawarkan pemandangan yang mempesona serta kondisi alam yang masih terjaga, Kontur daratannya yang berbukit-bukit membuat Pulau Padar jadi sangat menarik untuk dijelajahi. Anda harus siapkan stamina dan membawa air mineral karena rasanya tidak afdol saat berkunjung ke Pulau Padar jika anda tidak melakukan trekking ke bukit tertinggi.

Pulau Padar sudah menjadi destinasi populer di media sosial karena menjadi tempat wisata yang fotogenik, jika anda ingin berkunjung kesana selalu siapkan kamera dan smartphone anda





untuk mengambil momen berharga bersama keluarga, teman-teman atau orang tercinta dengan latar belakang pemandangan Pulau Padar yang indah.

Puas menaklukkan Pulau Padar, destinasi kami selanjutnya adalah menuju Pulau Komodo, salah satu habitat bagi hewan purba langka yang masih hidup sampai saat ini, yaitu Komodo. Perjalanan menuju Pulau Komodo memakan waktu 1 jam.

Sesampainya di Pulau Komodo, kami langsung disambut dengan tulisan “Welcome to Komodo National Park” yang terpampang di gapura yang berdiri kokoh, dengan membayar tiket masuk seharga Rp. 80 ribu/orang kami langsung disuguhi beberapa hewan komodo yang berkeliaran bebas tanpa ada sekat pembatas dengan pengunjung, untuk para travellers yang akan datang kesana jangan khawatir, karena akan ditemani beberapa tour guide/ranger yang sudah terlatih dan ahli untuk memandu kemanapun pergi serta menjaga dari serangan komodo maupun hewan-hewan liar yang ada di pulau tersebut.

Ada sekitar 3.000-an ekor komodo yang masih bertahan

hidup sampai saat ini. Tapi menurut informasi yang didapat, bertemu komodo di perjalanan bisa dibilang suatu keberuntungan. Tapi tidak butuh waktu lama sudah bertemu satu ekor saat kami baru memasuki pintu masuk.

Setelah melihat wujud nyata dari hewan langka tersebut, kami juga dapat mengabadikan momen (foto) bersama binatang predator tersebut. Dengan catatan, harus tetap menjaga jarak karena jika terlalu dekat dengan hewan tersebut takutnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Destinasi selanjutnya setelah Pulau Komodo, kami berkesempatan untuk mengunjungi Gua Batu Cermin, salah satu objek wisata geologi di Labuan Bajo yang cukup menarik dan banyak dikunjungi wisatawan.

Gua ini terletak di Kampung Wae Kesambi, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores Barat, NTT. Tepatnya di sebelah timur pelabuhan Labuan Bajo, setibanya disana kami menghampiri salah satu pendopo untuk membeli tiket masuk seharga Rp.10.000/orang serta diwajibkan mengisi daftar nama pengunjung oleh petugas. Setelah

itu, kami juga ditemani oleh seorang pemandu yang akan mengarahkan kami dan memberikan cerita sejarah soal keberadaan Gua Batu Cermin terjadi.

Sang pemandu pun memulai obrolannya dengan menyebutkan Gua Batu Cermin ini ditemukan oleh Arkeolog Belanda bernama Theodore Verhoven pada tahun 1951, setelah diteliti oleh Verhoven Gua Batu Cermin ini dulunya berada di bawah permukaan laut karena banyak ditemukan fosil hewan laut, mendengar cerita seperti itu semakin menguatkan rasa penasaran kami seperti apa isi dalam Gua tersebut.

Ketika sampai di mulut gua, kami terkesan dengan pesona keindahan dari gua yang memiliki luas 19 hektar dengan tinggi gua sekitar 75 meter, sang pemandu meminta kepada para pengunjung termasuk kami untuk menggunakan helm dan membawa senter untuk penerangan.

Saat kami menelusuri ke dalam gua, di beberapa sisi gua terdapat fosil-fosil binatang purba yang menempel di antaranya terumbu karang, fosil ikan dan fosil kura-kura yang sudah membatu, yang mengindikasikan

bahwa lokasi gua ini dahulunya terendam oleh air laut atau merupakan bagian dari lautan. Lalu sang pemandu juga bercerita bahwa pada zaman penjajahan lokasi gua ini juga digunakan oleh tentara Jepang sebagai tempat bersembunyi dan benteng pertahanan pada masa peperangan dahulu kala.

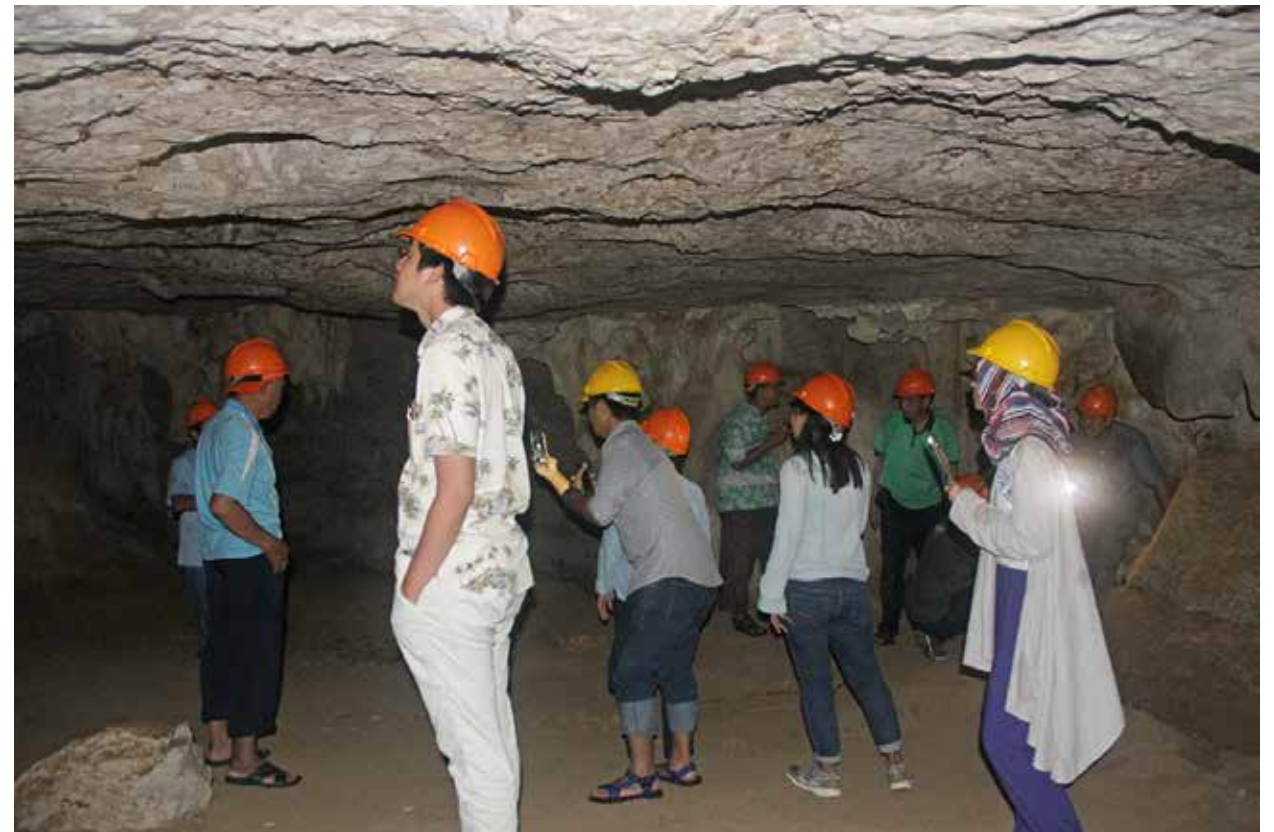
Mengapa disebut Batu Cermin, karena ada bagian dinding gua ini yang bagaikan layar lebar. Tidak jauh dari bagian tersebut ada lubang tempat masuknya cahaya matahari. Jika tepat sudah waktunya cahaya jatuh ke lubang tersebut dan mengenai bagian dinding tersebut, maka cahaya yang masuk akan direfleksikan ke seluruh celah gua yang mungkin dijangkau oleh cahaya.

Setelah puas mengeksplorasi Gua Batu Cermin, kami memutuskan untuk menuju destinasi keempat yaitu Bukit Amelia Sea, merupakan tempat berbukit yang berlokasi tidak jauh dari pusat kota Labuan Bajo. Bukit Amelia menawarkan pemandangan ke arah laut dari atas bukit kecil serta juga dapat melihat sunset bersama pasangan atau teman-temanmu karena di bukit ini kita bisa melihat matahari terbenam

dari ketinggian tanpa ada penghalang apapun. Pemandangannya langsung ke arah laut dan tidak ada daratan yang menghalangi.

Hari ketiga, sebelum kembali ke Jakarta kami menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh sebagai buah tangan untuk keluarga tercinta, kami mengunjungi Toko Souvenir Exotic Komodo yang berlokasi di Jalan Yohanes Sehadun, tepat di seberang Bandar Udara Komodo yang menjual berbagai macam pernik-pernik dan buah tangan khas dari daerah Flores. Diantaranya seperti gantungan kunci, kaos, kain tenun Songke dari Manggarai, tas, sandal, dan lain sebagainya.

Sekian cerita singkat kami setelah menikmati pesona keindahan di Labuan Bajo, jujur kami belum sempat untuk menelusuri semua destinasi wisata yang ada karena keterbatasan waktu selama disana. Yang terpenting, liburan kami disana dapat membawa cerita dan pengalaman yang sangat berkesan bahwa ternyata tidak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk berlibur, karena di Indonesia kita juga memiliki objek wisata yang sangat keren dan tentunya harus wajib dikunjungi. 





Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memperhatikan mobil listrik karya Universitas Islam Indonesia yang dipamerkan di Kementerian Perindustrian, Jakarta 26 Februari 2018. Mobil listrik tersebut dibekali mesin listrik magnet permanen berdaya 2000 Watt setara tiga Tk, dengan torsi mencapai 80 Nm, sumber energi yang digunakan berasal dari baterai lithium polymer berkapasitas 20 Ah dengan kemampuan discharge mencapai 600 A.



Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Direksi Teknologi PT. Yangtze Optik Indonesia Mr. Meng Quan, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail MT, Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional I Gusti Putu Suryawirawan, serta Direktur Industri Elektronik dan Telematika Achmad Rodjih Almanshoer melihat proses produksi pembuatan kabel serat optik PT. Yangtze Optics Indonesia di Karawang, Jawa Barat, 28 Februari 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi meninjau kabin bus elektrik Mobil Anak Bangsa pada Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GII COMVEC) 2018 di Jakarta Convention Center, 1 Maret 2018.



Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Peresmian Kawasan Industri JIPE di Gresik, Jawa Timur, 9 Maret 2018. Kawasan industri Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIPE) di Gresik, Jawa Timur ditargetkan dapat menampung sebanyak 183 industri dari berbagai sektor yang akan menyerap investasi senilai Rp83,2 triliun.



Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memperhatikan garam konsumsi yang diproduksi PT UnichemCandi Indonesia usai Peresmian Pabrik PT UnichemCandi Indonesia di Gresik, Jawa Timur, 9 Maret 2018.



Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melihat hasil cincinnya yang telah dicuci menggunakan sabun tradisional dari buah klerak disaksikan Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan ketika mengunjungi Sentra Industri Kerajinan Perak Kotagede di Yogyakarta, 29 Maret 2018.

BELAJAR DARI TEKNOLOGI KENDARAAN LISTRIK MITSUBISHI

Dalam COP21 di Paris pada Desember 2015, Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030.



Komitmen ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengurangi pemanasan global, di antaranya berasal dari emisi karbon dioksida (CO2) kendaraan bermotor yang mengonsumsi bahan bakar fosil.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian membuat sejumlah program aksi. Salah satunya adalah mempercepat pengembangan kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik.

Pengembangan kendaraan listrik sudah menjadi bagian dari peta jalan (roadmap) industri otomotif nasional. Di dalam peta jalan tersebut, 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2025 ditargetkan adalah LCEV, termasuk kendaraan listrik.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi otomotif, Kemenperin bersama dengan stakeholder terkait mengkaji kembali peta jalan industri tersebut, salah satu tujuannya untuk mendorong produksi LCEV.

Sejauh ini, tahapan yang

telah dilakukan Kemenperin adalah pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2). Kemudian, akan dilanjutkan dengan kendaraan hibrid dan kendaraan listrik.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, penahapan pengembangan teknologi menuju kendaraan listrik sangat diperlukan untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan pelaku industri menyiapkan regulasi atau payung hukum, infrastruktur pendukung, dan teknologi.

Sejalan dengan itu, industri komponen lokal seperti baterai, motor listrik, dan power control unit (PCU) perlu disiapkan untuk mendukung pendalaman struktur industri otomotif nasional, khususnya kendaraan listrik. Upaya ini juga sesuai dengan amanat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015.

Program pemerintah mengembangkan kendaraan listrik mendapat dukungan dari produsen otomotif di dalam negeri. Salah satu dukungan datang dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Jepang.

Melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Kemenperin mengajak MMC bekerja sama dalam rangka studi bersama dan sosialisasi penggunaan mobil listrik di Indonesia.

"Kerja sama ini menjadi sebuah langkah positif dalam mempercepat pengembangan teknologi industri otomotif nasional yang ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah," kata Menperin pada acara serah terima kendaraan listrik Mitsubishi di Jakarta, 26 Februari silam.

Kendaraan diserahkan secara simbolis oleh CEO MMC Osamu Masuko kepada Menperin. Selanjutnya Menperin akan menyerahkan masing-masing kepada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Ristekdikti, Kapolri, dan Kepala BBPT.

PROGRAM LCEV

Penyerahan kendaraan listrik ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Kemenperin dan MMC pada

30 Oktober 2017 dalam program pengembangan LCEV.

Kerja sama mencakup tiga hal, yaitu studi bersama di bidang teknologi dan pengembangan kendaraan listrik, sosialisasi penggunaan kendaraan listrik dan penggunaan kendaraan listrik untuk kepentingan umum.

Kendaraan listrik yang diserahkan MMC berjumlah 10 unit, terdiri dari delapan unit Mitsubishi Outlander PHEV (model SUV plug-in hybrid) dan dua unit Mitsubishi i-MiEV.

Mitsubishi Outlander PHEV memiliki kecepatan maksimal 200 km per jam dan mampu menempuh jarak 800 km dengan kombinasi bahan bakar bensin dan tenaga listrik. Apabila hanya menggunakan tenaga listrik (full EV), mobil ini mampu menempuh jarak 55 km.

Sementara, Mitsubishi i-MiEV memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam dan jarak tempuh 120 km dengan kondisi full charge listrik.

Rencananya, kendaraan-kendaraan ini akan disertakan

dalam serangkaian studi bersama untuk melihat kinerja mobil listrik di lalu lintas Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Selain itu, sebagai sosialisasi dan melihat respons masyarakat terhadap kendaraan listrik di Indonesia.

Osamu Masuko mengungkapkan bahwa studi bersama ini merupakan langkah untuk mendukung transisi Indonesia ke era industri kendaraan bermotor emisi rendah karbon.

Menperin berharap kerja sama ini mampu mewujudkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri otomotif dalam negeri sehingga mampu memproduksi kendaraan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun global.

Dia menjelaskan, strategi pengembangan LCEV dan kendaraan listrik dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya memberikan insentif kepada kendaraan yang beremisi karbon rendah, serta melakukan kajian dan sosialisasi penggunaan kendaraan listrik,

Selanjutnya, melakukan pilot project untuk daerah atau jenis kendaraan tertentu atau kendaraan untuk keperluan tertentu untuk menggunakan kendaraan listrik seperti kendaraan ekspedisi, transportasi umum dengan rute tertentu, dan kendaraan yang beroperasi pada daerah tertentu.

Selain itu, perlu mendorong pembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti stasiun pengisian (charging station), mendorong kemampuan industri komponen kendaraan listrik melalui R&D dan standarisasi, serta terus menyempurnakan bisnis model kendaraan listrik.

Kemenperin juga telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif bagi LCEV guna mempercepat program pengembangan kendaraan emisi rendah tersebut. 

Baristand Industri Palembang

MENJADIKAN KARET DAN KOPI BERNILAI TAMBAH TINGGI

Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Palembang atau BIPA menjadi ujung tombak bagi Kementerian Perindustrian dalam pengembangan teknologi proses produksi karet dan kopi olahan di dalam negeri.



Hasil penelitian dari unit pelayanan teknis di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin ini sudah banyak diterapkan kalangan industri, terutama pengolahan karet dan kopi.

Hasil riset dari BIPA, di antaranya karet otomotif, aspal berket, karet untuk bahan bangunan, karet untuk alat kesehatan, dan ban vulkanisir. Prototipe produk-produk tersebut mempunyai kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan biaya produksi yang bersaing.

BIPA berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan, daerah penghasil terbesar komoditas karet dan kopi di Tanah Air. Dari provinsi

ini, BIPA ikut berupaya menaikkan citra kopi daerah melalui program hilirisasi dan sosialisasi SNI kopi.

Agar layanan teknis balai yang berdiri sejak 37 tahun lalu ini lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya kalangan industri, BIPA menggelar business gathering beberapa waktu lalu.

Kepala BIPA Quri Siti Mirah mengatakan kegiatan promosi tersebut diperlukan untuk menjawab tingginya kebutuhan industri terhadap layanan sertifikasi dan pengujian, seiring dengan meningkatnya peran standardisasi industri.

BIPA antara lain menyediakan layanan jasa sertifikasi produk,

sertifikasi sistem manajemen mutu, jasa pengujian dan pengawasan (laboratorium aneka komoditas, pencemaran, mikrobiologi, dan kalibrasi), jasa rancang bangun atau perekayasa mesin dan peralatan industri, serta jasa pelatihan.

Quri mengungkapkan, semua lembaga sertifikasi dan laboratorium BIPA telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan, lembaga litbang, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.

Sinergi ini juga bertujuan penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis karet alam dan kopi, serta pelaksanaan kegiatan litbang di bidang teknologi proses produksi.

Beberapa kerja sama melibatkan perusahaan alat-alat kesehatan, solid tire, crumb rubber, Universitas Sriwijaya, Politeknik Jambi, Dinas Perindustrian Perdagangan beberapa kabupaten, Dinas Perkebunan beberapa kabupaten, perguruan tinggi swasta lain dan Lembaga Litbang Daerah, serta kementerian/ lembaga.

PENGEMBANGAN PRODUK KARET

Belum lama ini, BIPA juga menjalin kerja sama dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, untuk memberikan pelatihan pembuatan produk karet bagi Unit Pelaksana



Teknis Daerah (UPTD) dari tujuh kecamatan di kabupaten itu.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan pengetahuan mengenai teknik pencetakan ban vulkanisir, komponen untuk karet otomotif, karet souvenir, dan barang rumah tangga seperti karpet karet. Pelatihan berlangsung selama lima hari dalam dua gelombang.

Gelombang pertama digelar pada 5-9 Februari 2018 dan gelombang kedua pada 12-16 Februari 2018. Pelatihan ini diikuti sebanyak 25 orang peserta, terdiri dari perwakilan Unit Pengelolaan Pemasaran Bokar (UPTB) dan UPTD Kabupaten Musi Banyuasin.

Pelatihan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara BIPA dan Pemkab Musi Banyuasin dalam program hilirisasi produk karet alam dan turunannya.

Selain jasa pelatihan pengolahan karet alam, Baristand Industri Palembang menyediakan pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi produk untuk mendukung jaminan mutu produk karet alam dan turunannya agar sesuai dengan SNI.



Kerja sama tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara. "BIPA merupakan binaan kami di BPPI, turut mendukung bisnis hilirisasi industri karet alam mengingat pasarnya yang cukup potensial," ungkapnya.

Dia mengatakan pemerintah mendorong optimalisasi



pemanfaatan karet alam sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Saat ini, penyerapan karet alam didominasi oleh industri ban kendaraan bermotor.

Produk ban merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia. Dari total produksi ban, 70 persen diperuntukkan bagi pasar ekspor dengan nilai mencapai USD1,5 miliar per tahun.

Merujuk data Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), karet alam menyumbang sebesar 45 persen untuk bahan baku ban. Kebutuhan karet alam di pasar domestik sekitar 600 ribu ton dari total produksi per tahun yang mencapai 3,3 juta ton.

Ngakan Antara mengatakan, masih terdapat peluang besar menciptakan cabang-cabang industri baru, seperti industri ban pesawat dan vulkanisir pesawat terbang yang dapat menyerap karet alam dalam jumlah besar dan mencetak devisa.

Peluang pasar lainnya yang cukup besar adalah produk karet untuk kapal dan pelabuhan, seperti rubber dock fender, rubber floating fender, rubber bumper, dan sebagainya. **mi**

SAATNYA PASAR ELEKTRONIKA KELUAR DARI LEMBAH

Penjualan produk consumer electronics di dalam negeri pada tahun 2017 mencapai titik terendah sejak beberapa tahun terakhir. Data GFK menunjukkan penjualan turun hingga 15 persen dibandingkan dengan tahun 2016.

66



Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan dampaknya terhadap industri elektronika (consumer electronic) nasional.

Penurunan penjualan tersebut dianggap mencerminkan merosotnya daya beli konsumen. Anggapan ini diperkuat kenyataan banyak toko ritel di pusat perbelanjaan yang gulung tikar.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar daya beli konsumen merosot begitu tajam sehingga pasar elektronika akan sulit untuk bangkit kembali?

Untuk menguak fenomena ini, Media Industri berbincang dengan pemerhati sekaligus praktisi ritel Rozalis A. Sandang. Pria yang berpengalaman bekerja di industri consumer goods ini menilai penurunan penjualan elektronika itu harus disikapi dengan seksama.

Penurunan pasar elektronika ini seiring dengan kondisi pasar produk konsumsi cepat atau fast moving consumer goods (FMCG). Untuk diketahui, pasar FMCG menjadi salah satu barometer penting dalam menentukan kondisi pasar secara makro.

Secara gabungan, penjualan FMCG pada tahun 2017 hanya tumbuh satu digit yakni 2,7 persen. Padahal, dalam kurun waktu 2003 – 2016, rata-rata pertumbuhan sektor ini selalu dua digit yakni di kisaran 13 persen per tahun.

Memasuki tahun 2015, pertumbuhan penjualannya mulai melambat yakni sekitar 10 persen, kemudian turun lagi menjadi 7 persen tahun 2016, dan tinggal 2,7 persen pada tahun 2017.

Menurut Alis – sapaan akrab Rozalis, pertumbuhan pasar consumer electronic yang turun hingga 15 persen pada tahun 2017, merupakan yang terdalam selama kurun waktu 3 tahun terakhir, sejalan dengan penurunan pertumbuhan pasar FMCG. Apalagi mengingat pasar elektronika lebih captive dibandingkan dengan FMCG.

Ada opini yang berkembang di masyarakat yang mengatakan bahwa turunnya pasar consumer electronic di Indonesia, khususnya untuk modern channel, disebabkan banyaknya toko ritel di mal yang tutup akhir-akhir ini.

Pebisnis offline akan tetap eksis dengan role atau peran yang baru, yakni mampu menghadirkan pengalaman berbelanja sembari memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk yang akan dibeli.

Opini tidak sepenuhnya benar sebab toko-toko ritel yang tutup tersebut kebanyakan dari industri fashion design milik brand asing. Meskipun memberikan dampak kepada industri elektronika dalam hal penurunan jumlah traffic atau pengunjung ke mal tersebut.

BRAND GLOBAL

Sebenarnya, penutupan toko-toko ritel tersebut sejalan dengan restrukturisasi perusahaan di negara asalnya. Kebanyakan brand tersebut sedang mengatur strategi yang tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi global ekonomi yang masih tidak menentu.

Selain itu, mereka berusaha menyeimbangkan bisnis online yang sedang mereka kembangkan dengan bisnis offline yang sudah mereka miliki sebelumnya. Restrukturisasi tersebut berdampak ke bisnis global, termasuk Indonesia.

Apakah selamanya mereka akan tutup? “Belum tentu, mereka sedang mengubah format. Mereka tentu akan melihat perkembangan kondisi pasar yang menjadi target mereka sebelum membuka jaringan lagi,” kata lulusan Business Administration yang juga mengambil minor di Economic dari Wichita State University, Amerika Serikat, ini.

Khusus di pasar consumer electronic di Indonesia, kontribusi jaringan modern channel sekitar 30 persen atau masih di bawah kontribusi pasar tradisional atau traditional channel.

Memang ada beberapa toko ritel elektronika di mal yang tutup atau downsizing yang sebenarnya lebih kepada restrukturisasi strategi perusahaan untuk menghadapi kondisi terkini di masyarakat.

Apabila modern channel tutup, bukan berarti pasar consumer electronic akan turun selama-lamanya. Orang akan tetap membeli produk elektronik karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat zaman sekarang.

Sebagai contoh, ketika seorang konsumen ingin membeli televisi di satu toko ritel di dalam sebuah mal, dan kebetulan toko tersebut sudah tidak berbisnis lagi, konsumen tersebut akan membeli dengan cara yang berbeda; apakah dengan datang ke toko ritel tradisional atau membeli secara online. Artinya, permintaan akan selalu ada.

Adapun cara berbelanja yang berbeda tersebut, dalam hal ini terjadinya metafora dari offline menjadi online atau e-commerce, juga menunjukkan adanya fenomena baru di dunia ritel.

Artinya para pelaku bisnis consumer electronic harus mengubah strategi bisnis offline mereka sesuai dengan perilaku konsumen saat ini.

Konsumen produk elektronik masih membutuhkan interaksi (experience) dengan produk yang akan mereka beli. Artinya, para pebisnis offline akan tetap eksis dengan role atau peran yang baru, yakni mampu menghadirkan pengalaman berbelanja sembari memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk yang akan dibeli.

POTENSI PASAR

Melihat perkembangan pasar saat ini, Alis optimistis penjualan elektronika kembali tumbuh positif pada tahun 2018 setelah terjun bebas pada tahun lalu.

Dia mengibaratkan kondisi pasar consumer electronic pada tahun 2017 seperti berada di dasar lembah. “Setelah sampai di dasar lembah, ada waktunya kita harus naik lagi dong. Meskipun belum bisa naik secara signifikan, tapi setidaknya tidak jatuh lebih dalam lagi,” ungkap Alis.

Optimisme ini juga tercermin dari data GFK, yang memproyeksikan pasar consumer electronic nasional pada tahun 2018 akan tumbuh sebesar 2 persen. Sebenarnya ini proyeksi yang cukup wajar mengingat penurunan 15 persen pada tahun 2017 bukan hal yang mudah untuk bisa cepat bangkit.

Tetapi paling tidak proyeksi ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelaku bisnis consumer electronic untuk berbelanja dan berbisnis kembali dengan strategi yang baru.

Kalau melihat konteksnya, tahun 2018 seharusnya ada prospek lebih baik karena pasar sudah turun cukup dalam pada tahun sebelumnya. Perlu diingat pula pengalaman cukup baik pada tahun 2015 ketika pasar consumer electronic tumbuh hingga 6 persen.

Alis menceritakan, ketika dirinya terjun ke industri consumer electronic pada tahun 2011, penjualan selalu mencetak rekor hampir setiap bulan. Dia yakin saat itu merek lain pun menikmati lonjakan penjualan hingga tahun 2015.

Namun, penjualan mulai drop ketika memasuki semester kedua 2016. Kondisi berlangsung sampai akhir tahun lalu. Adapun industri yang masih mampu tubuh diantaranya sektor makanan-minuman dan wisata. Sampai sekarang kedua sektor ini masih terus tumbuh.

Lebih jauh lagi, kelesuan pasar consumer electronic sejak 2016 perlu dilihat berdasarkan segmen konsumen dan faktor pemicunya.

Pasar consumer electronic terbagi ke dalam dua segmen konsumen, yakni menengah-bawah (mid low) dan menengah-atas (mid high). Masing-masing segmen dipengaruhi faktor berbeda yang mempengaruhi permintaan terhadap produk.

Di segmen menengah-bawah, salah satu pemicu merosotnya penjualan adalah pengurangan subsidi listrik pada tahun 2017, selain pemangkasan subsidi bahan bakar minyak yang terjadi sejak sebelum tahun 2016.

Selain itu, upaya pemerintah menggenjot proyek infrastruktur jalan tol juga mempengaruhi daya



Rozalis A. Sandang

beli konsumen karena diikuti dengan kenaikan tarif jalan tol beberapa kali.

Kondisi berbeda terjadi di segmen menengah-atas. Konsumen di segmen ini cenderung menahan dananya, yang berarti daya beli konsumen sebenarnya tetap ada. Ini dapat dilihat dari data jumlah orang yang menabung tumbuh 12 persen pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar 10 persen.

“Orang menahan belanja atau wait and see. Uang ada, tapi oleh mereka apakah uang itu mereka tabung atau mereka simpan dalam bentuk investasi lain” kata ayah dua putri yang menyukai travelling ini.

Hal ini juga bisa dilihat dari data deposito berjangka yang tumbuh 6 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, lalu tumbuh lagi hingga 8 persen pada tahun 2017.

STRATEGI INDUSTRI

Ketika pasar lesu, persaingan tentunya semakin kuat. Dalam kondisi seperti ini, pelaku industri consumer electronic dituntut untuk mampu memainkan strategi yang tepat agar pangsa pasar tidak jebol.

Setiap merek biasanya bermain di segmen tertentu. Misalnya, mereka Korea dan Jepang biasanya bermain di segmen menengah-atas. Sedangkan merek China dan lokal umumnya memulai penetrasi pasar dari segmen menengah-bawah. Setelah cukup kuat, biasanya mereka akan mulai masuk ke segmen menengah-atas.

Bagi merek-merek yang bermain di produk menengah-bawah bisa memanfaatkan kondisi pasar saat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan penjualan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, ada tantangan yang dihadapi merek-merek yang bermain di segmen menengah-atas terkait dengan isu daya beli masyarakat (affordability).

Selama konsumen menengah-atas masih wait and see, merek-merek tersebut harus benar-benar menjalankan strategi pemasaran yang jitu untuk bisa survive bermain di produk premium.

Alis juga berharap, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bisa memainkan peran penting untuk membantu industri elektronika nasional supaya bisa segera bangkit.

Sebagai contoh, pemerintah bisa mempermudah proses investasi dari merek-merek asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu diperlukan juga regulasi untuk perlindungan dan kepuasan konsumen.

Hal lain adalah regulasi untuk melindungi merek-merek yang ingin berinvestasi dan masuk ke segmen lebih luas, sekaligus membantu industri dalam negeri mendapatkan alih teknologi.

“Pemerintah bisa memberlakukan regulasi untuk alih teknologi, yang mana harus ada timbal balik bagi merek-merek yang ingin melakukan alih teknologi tersebut yakni perlindungan investasi. Sudah pada tempatnya merek-merek asing ikut bertanggung jawab mengembangkan merek local,” ungkap Alis.

Untuk itu diperlukan ukuran kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun industri, demi kepentingan konsumen.

KPI itu harus sejalan antara pemerintah dan industri yang bermuara pada kepentingan konsumen atau masyarakat. Jangan sampai pemerintah dan industri terbelenggu dengan KPI masing-masing dan berpikir jangka pendek sehingga konsumen menjadi korban. **mi**

Ikuti terus update berita terkait industri langsung di hp-mu. Follow Akun Medsos Kemenperin



kemenperin_ri



@Kemenperin_RI



Kementerian Perindustrian RI



Kementerian Perindustrian RI



PAKAILAH **BAN MOBIL** BERLABEL

SNI



SNI 0098-2012